

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN
(STUDI PERKARA TAHUN 2008 s/d 2010)**

Oleh

Riri Silvia

Nim.10 HUKI 1955

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan

Medan, 6 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.M.Yasir Nasution.
NIP.195001518197703101

Dr.Azhari Akmal Tarigan M.Ag
NIP.197212041998031002

PENGESAHAN

Tesis berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (STUDI PERKARA TAHUN 2008 s/d 2010)**”an. Riri Silvia, NIM 10 HUKI 1955 Program Studi Hukum Islam telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU pada tanggal 6 Mei 2013.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master Of Art (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 6 Mei 2013

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN- SU

Ketua,

Sekretaris,

Prof.Dr. Nawir Yuslem,MA
NIP. 195808151985031007

Dr. Faisar Ananda Arfa, MA
NIP. 196407021992031003

Anggota

1.
(Prof.Dr. Nawir Yuslem, MA)
NIP.195808151985031007

2.
(Prof.Dr.Ahmad Qorib, MA)
NIP. 195804141987031002

3
(Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag)
NIP. 197212041998031002

4
(Dr. Faisar Ananda Arfa, MA)
NIP. 196407021992031003

Mengetahui

Direktur PPs IAIN-SU

Prof.Dr.Nawir Yuslem, MA
NIP. 195808151985031007

ABSTRAK

Sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, masyarakat masih melakukan pengangkatan anak dengan cara hukum adat atau dengan cara menyerahkan anak dengan mengharapkan mendapatkan imbalan yang cukup besar. Pengangkatan anak masih belum berpedoman kepada Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan dampak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Jenis penelitian tesis ini berdasarkan penelitian normatif. Dengan menggunakan penelitian metode study perkara (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

Penulis melakukan pendekatan terhadap Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan terlebih dahulu. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini diberlakukan masih ada perkara yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dilihat dari segi akte kelahiran. Dengan adanya penegasan Hakim dalam perkara pengangkatan anak maka Peraturan Pemerintah tersebut dapat berjalan. Dimana orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan tata cara pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Begitu pula dengan usia anak yang akan diangkat. Dilakukannya pengangkatan anak bertujuan untuk mensejahterakan anak dari usia bayi sampai dewasa dan mandiri. Walaupun pengangkatan anak dilakukan menurut hukum adat, KHI, Undang-undang namun juga berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

ABSTRACT

Previously there is a Government Regulation No. 54 Year 2007 (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007) about Adopt of Child, the society adopted a child through Customary Law and give their child to get a big compensation. A child adoption was not implemented Government Regulation No 54 Year 2007, Islamic Law Compilation, and Law No 1 Year 1974. The thesis aims are to know the implementation and impacts of Government Regulation No 54 Year 2007 about Adopt a Child. The research is based on normative approach and using case study method. Setting of research is a child adoption in Religious Court in 2008 until 2010.

The researcher makes an approach to Republic Indonesia Law No 3 Year 2006 (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006) about Constitution Amendment No 7 Year 1989 about Customary Law, Marriage Law No 1 Year 1974, Law No 23 Year 2003, Islamic Law Compilation, and Government Regulation No 54 Year 2007.

Based on research the implementation of Government Regulation No 54 Year 2007 was not contrast with previously constitution. Its implementation cares about child's *nasab* to their parents. Issues of Government Regulation No 54 Year 2007 in Religious Court especially in Religious Court- Medan. It has been implemented a child adoption based on Government Regulation No 54 Year 2007. Actually after issued Government Regulation No 54 Year 2007 it is still can be found the cases which are not match with Government Regulation No 54 Year 2007, in Birth Certificate case. The Judge's firm attitude make the people that want to adopt a child must implement it.

Parent must see the child's age that will be adopted. Purpose of child adoption is to make the child's welfare from they are still baby until to be an independent adult. Although a child adoption is based on Customary Law, Islamic Law Compilation, they are guided by Government Regulation No 54 Year 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah memberi rahmat dan hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. dalam membawa dan mengajarkan Islam menjadi petunjuk bagi manusia. Sehingga sebagai ummat Islam kita dapat menjalankan ajaranNya.

Tesis ini berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Terhadap Perkara 2008 s/d 2010)**”. Merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana (S2) *Master of Arts* (MA) pada program Pascasarjana IAIN-SU Medan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis mengalami kesukaran dan kemudahan, namun atas rahmat dan hidayah Allah swt. akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih terdapat banyak kekurangan. Berkenaan dengan ini, penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Direktur Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai Direktur PPs IAIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib sebagai Ketua program studi Hukum Islam.
3. Bapak Prof. Dr. Yasir Nasution sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.
4. Dan terima kasih para dosen-dosen yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Penulis mengucapkan terimakasih atas segala do'a kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat yang terhadap penulis.

6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada abang, kakak yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

7. Terakhir terima kasih kepada teman-teman jurusan HUKI tahun 2010, memberikan bantuan dan memberikan semangat.

Dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis masih menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Demikianlah penulis mengucapkan terima kasih.

Medan,

Penulis

Riri Silvia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

| | | | |
|-------|--------|---|---|
| --َ-- | Fathah | A | A |
| --ِ-- | Kasrah | I | I |
| --ُ-- | Dammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| يَـ | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| وَـ | fathah dan waw | Au | a dan u |

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

yazhabu : يذهب

suila : سئل

kaifa : كيف

hula : هول

c. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan tanda | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|------------------|------|-----------------|------|
|------------------|------|-----------------|------|

| | | | |
|-------|-------------------------|---|---------------------|
| سَا | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| يَ-يِ | Kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| وُ-وِ | Dammah dan waw | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قيل : qila

يقول : yaqūlu

d. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *ta marbuṭah* hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال → raudatul atfāl : - raudah al-atfāl

المدینة المنورة : - al-Madinatul al-munawwarah

طلحة : - Ṭalhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nu‘ima : نَعَمَ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badi'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khai ar-rāziqin : وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqin : وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aufū al-kaila wa al-mizāna : فاو فوا الكيل والميزان
- Fa auful-kaila wal-mizāna : فاو فوا الكيل والميزان
- Ibrāhim al-Khalil : ابرا هيم الخليل
- Ibrāhimul-Khalil : ابرا هيم الخليل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasul
- Alhamdu lillahi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jamia'an
- Wallahubikulli syai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah swt., yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak si anak. Dalam perkawinan pasangan suami istri tentu sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Namun ketika si anak yang dinantikan belum juga ada pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak, dengan mengangkat anak sebagai “anak kandung” dan memperoleh segala hak seperti pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Pengangkatan anak sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia, baik dilakukan secara adat, hukum Islam, maupun secara formal menurut peraturan perundang-undangan. Bahkan penduduk yang mayoritas beragama Islam pun sudah biasa melakukan pengangkatan anak.¹

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung juga terjadi pada zaman sebelum dan awal Islam. Tradisi itu pernah pula dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. sebelum menerima kerasulannya.² Setelah Nabi Muhammad saw., diangkat menjadi Rasul turunlah Alquran surat *al-Ahzab* ayat 4.

¹Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet 1, h. 18

²Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Mun³r*, (Beirut: Dār al Fikr, 1991), jilid 21-22, h.238-240.

Dilihat dari kasus Zaid Ibn Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khuwailid kepada Muhammad. Kemudian dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi Muhammad saw. Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik menyatakan bahwa sebelum kenabian Rasulullah saw., sendiri pernah mengangkat anak Zaid bin 'aritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya ('aritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah saw., dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah, di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad saw., juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muththalib, bibi Nabi Muhammad saw., oleh karena Nabi saw. telah menganggapnya sebagai anak maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Sesudah itu turunlah wahyu surat al-Ahzāb ayat 4 tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, turunan, perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar dengan nama Zaid bin 'aritsah. Sebagaimana diketahui Zaid seorang yang berdiri di barisan depan membantu perjuangan Rasulullah saw. dan beliau tewas di medan peperangan sebagai pahlawan dalam perang Mukhtah tahun 8 Hijriyah.



“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya ; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).³

Surat *al-Ahzab* ayat 4 ini dijelaskan oleh Muhammad Ali as-ḥabuni dalam Tafsir Ayat al-Aḥkām sebagaimana berikut ini:

لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أمّاً، ولا الولد المتبنّي ابناً، لأنّ الأمّ الحقيقية هي التي ولدته و الإبن الحقيقي هو الذي جاء من صلب ذلك الرجل فلا يمكن للإنسان أن يكون له أبوان

”tidak mungkin yang bukan istri dipanggil ibu dan tidak mungkin yang bukan anaknya atau yang mengangkat anak dipanggil anak. Ibu yang sebenarnya adalah yang melahirkannya dan anak pada hakekatnya adalah yang datang dari tulang sumsum seorang laki, maka tidak mungkin seorang anak mempunyai 2 orang ayah. Maka hukum tabanni dalam Islam adalah haram dan termasuk dosa besar karena terjadi penisbaan seorang anak kepada bukan orang tuanya.”⁴

³*Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 2000), h. 924.

⁴Muhammad Ali as-ḥabuni dan Mujallad Saniah, *Tafsir al Ayat Ahkām min al-Qur'ân*, (Beirut :Dār al Kutub al Ilm³yah, 2004), h. 185, 191.

Dengan turunnya ayat ini, Nabi saw. memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Beliau bersabda :

“Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga baginya haram.” (HR. Bukhârî melalui Sa’id Ibn Waqqash).⁵

Kata *ad’iyâ/ anak-anak angkat* adalah bentuk jamak dari kata *da’i* yang terambil dari kata *id’â* yakni *mengaku*. Yang dimaksud dengan *ad’iyâ* adalah anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri, kata ini menunjuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan anaknya, hanya dia yang mengangkat sebagai anak dan memberinya hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak kandung. Allah berfirman QS. *al-Ahzab* ayat 4 *mâja’ala ad’iyâ’akum abnâakum / tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu*, bukannya melarang pengangkatan anak angkat (*adopsi*), atau menjadi ayah/ibu asuh yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan *ad’iyâ’akum/ anak-anak angkat kamu*, menunjukkan diakuiinya eksistensi anak angkat tetapi dicengah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.⁶

Menurut hukum Islam status anak angkat tidak sama dengan anak kandung, anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Akibat hukum mengangkat anak tidak memutuskan hubungan nasabnya, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris tapi anak angkat dapat menerima wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Konsep

⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur,ân* (Jakarta: Lentera Hati, cet 9, 2008), h. 221.

⁶ *Ibid*,

⁷ Bunyi pasal 209 KHI

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. 2. Terhadap anak angkat yang

pengangkatan anak menurut Hukum Islam dengan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang dan perhatian seperti anak sendiri tanpa diberikan status anak kandung kepadanya.

Di tengah-tengah masyarakat Indonesia masalah adopsi adalah hal yang biasa dalam KUHPerdara tidak mengatur secara terperinci masalah adopsi tersebut, namun pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi. Karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, khusus mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi yaitu :

menyebutkan bahwa seorang laki beristeri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkatan, maka boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya, pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.”⁸

Yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa. Dengan *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 seperti disebutkan oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada, yang mengemukakan data adopsi menurut Hukum Barat sesuai *Staatsblad* 1917 Nomor 129.⁹

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dengan segala akibat hukumnya yaitu mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat, suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri¹⁰.

tidak menerima wasit diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

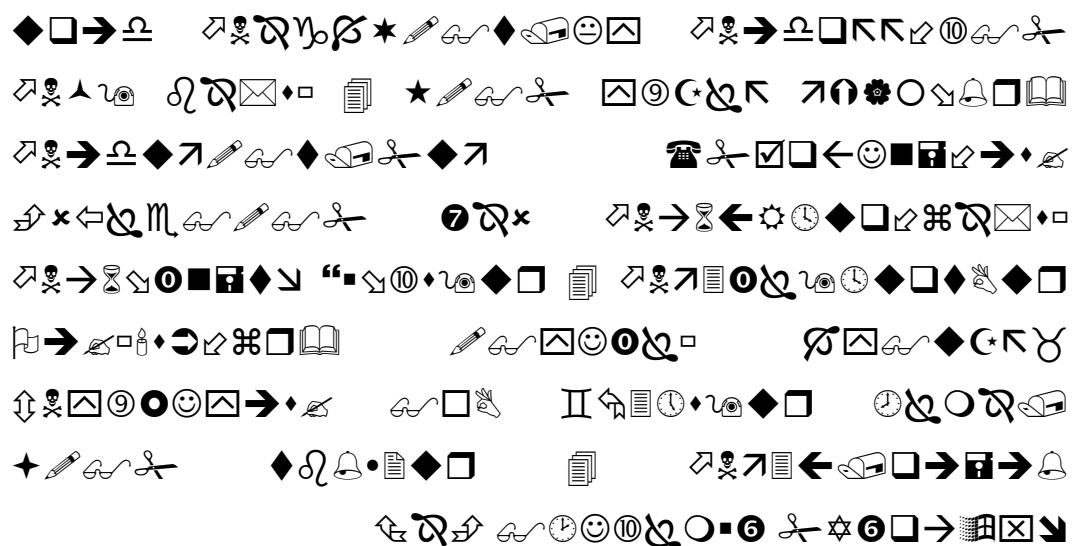
⁸Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinagrafika, cet 5, 2006), h. 40.

⁹*Ibid*, h. 33.

¹⁰*Ibid*, h. 40, lihat h.3

Hukum perdata pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri, dengan adanya perubahan status dari anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya, misalnya mengangkat anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dan diberi status anak kandung berhak memakai nama keturunan (nasab) dari ayah angkat. Contohnya Maya binti Tono anak kandung dari bapak Tono diangkat oleh bapak Karim, namanya berubah menjadi Maya binti Karim.¹¹

Seperti dikemukakan contoh diatas Hukum Islam melarang memanggil anak-anak angkat dengan sebutan nama ayah angkatnya, sebagaimana firman Allah swt. QS. *al-Ahzab*/33:5



“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Sebab turunnya ayat ini Imam Bukhârî meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata “Kami masih tetap memanggil Zaid bin ʿaritsah dengan Zaid bin

¹¹Muderis Zaini, *Adopsi*, h.33.

¹²*Al-Qurʾân dan Terjemahan*, (Semarang: Asy Syifaʾ, 2000), h. 925.

Muhammad hingga turun ayat, Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah....¹³

Ali As-ṣabuni mengungkapkan beberapa hadis tentang pengharaman tabanni,¹⁴ diantaranya :

عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ الدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه البخاري)

“Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bukan ayahnya, maka surga haram baginya.” (HR .Bukhari).¹⁵

Sedangkan hadis yang berkaitan dengan pengangkatan anak antara lain dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhâri dan Muslim: Dari Abu Dzar ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.”¹⁶

Oleh karena itu tabanni adalah haram dalam Islam karena hal tersebut bertentangan dengan hakekat yang sebenarnya orang lain. Allah tidak akan menjadikan orang yang mengangkat anak itu menjadikan anaknya yang sebenarnya, mereka adalah anak orang tuanya yang melahirkannya oleh karena itu *tabanni* hukumnya adalah haram. Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Hârithah pada masa jahiliyah, dikatakan Zaid bin Muhammad. Demikian juga Umar bin al-Khattab mengangkat Amir bin Abi Rabiah sebagai anaknya dan juga Abu Huzaifah mengangkat anak Salim. Dengan ayat diatas Allah swt. meniadakan tabanni dan mengharamkannya kemudian diikutkan dengan firman Allah QS. *Al-Ahzab* ayat 40 Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki

¹³Jalaluddin As-Suyuthi, *Lubb al-An-Nuqul fî Asbab al-Nuzul*, terj. Tim Abdul Hayyie, *Asbab Nuzul:Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’ân*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet 1, h.446.

¹⁴Muhammad Ali As-ṣabuni dan Mujallad Ṣaniah, *Tafsir al-Ayat Ahkām min al-Qur’ân*, h. 191.

¹⁵Ibn Hajar al-‘Asqalânî, *Fath al-Bârî* (Kairo: Dâr Miṣr, 2001), jilid XII, h. 75.

¹⁶Quraish, *Tafsir Al-Misbah*,h.222

kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁷

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

“Barangsiapa nan disebut bukan kepada bapaknya atau berafiliasi bukan kepada walinya, maka baginya laknat Allah nan berkelanjutan” [Hadits Riwayat Abu Daud].

Menurut hukum adat status anak angkat baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam hal ini, pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan yang baru dengan memutuskan hubungannya dengan keluarga lama. Anak angkat ada yang mewarisi harta orang tua angkatnya seperti ia berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat tersebut berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah, dimana sistem keluarga berdasar keturunan dari pihak laki-laki (patrilineal).¹⁸ Meskipun pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku, namun masih diperlukan lagi pengesahan dengan suatu penetapan pengadilan atau dengan suatu akta notaris yang disahkan oleh pengadilan setempat.

Sistem kekerabatan patrilineal contohnya pada masyarakat Batak (Tapanuli Utara) mengangkat anak, anak laki-laki merupakan penerus keturunan ataupun marga dalam silsilah keluarga. Anak laki-laki sangat berarti kehadirannya dalam suatu keluarga.¹⁹

Masyarakat Jawa Timur melakukan pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan parental. Di daerah Jawa Timur anak angkat disebut dengan *pupon*, dikenal juga kebiasaan seseorang yang sudah mempunyai anak kandung mengangkat anak yang disebut dengan anak pungut. Sebutan anak angkat dengan

¹⁷Wahbah Az Zuhailly, *Tafsir al-Mun³r*, h.233.

¹⁸Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 25.

¹⁹Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), cet 1, h. 69.

pengertian yang sama antara “anak *pupon*” dan anak pungut. Sistem pengangkatan anak di beberapa daerah dilakukan secara terang dan tidak secara tunai.²⁰

Selain masyarakat hukum adat dengan sistem parental, matrilineal dan patrilineal. Ada beberapa daerah yang hukum adatnya berpengaruh pada syariat Islam seperti masyarakat Melayu mengenal anak-anak seperti anak angkat “*pulang buntal*,” anak angkat “*pulang nama*”, anak angkat “*ulang serasi*”. Masyarakat Kalimantan Barat anak angkat disebut “*anak rusuk*”. Di Kalimantan Selatan anak angkat disebut dengan anak pungut, sejak kecil anak tersebut diangkat sampai si anak dewasa atau ia kawin.²¹

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sesuai Alquran dan sunah serta hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.²²

Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, yang tumbuh dan berkembang sejak zaman masa Rasulullah saw.. Peradilan Agama merupakan wujud Peradilan Islam dalam struktur dan kultur masyarakat bangsa Indonesia. Identifikasi Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam dilihat dari sudut pandang filosofis, yuridis, historis dan sosiologis.²³

Banyak hal yang melatarbelakangi masyarakat Islam untuk melakukan pengangkatan anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri
4. Untuk mendapatkan teman bermain anaknya

²⁰*Ibid*, h.76, lihat h. 9

²¹Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h. 80.

²²Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h.21.

²³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, cet 4, 2003), h.

5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja. maka terjadinya penyimpangan yang ingin mendapatkan tenaga kerja anak dibawah usia.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga²⁴

Kesadaran dan kepedulian masyarakat muslim di Indonesia semakin meningkat melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Masyarakat muslim yang ingin melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Dalam sejarah perundang-undangan yang berkaitan, dengan pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam Rancangan Undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Peradilan Anak.²⁵

Hal ini yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam satu pasal yaitu pada pasal 12 (dua belas) hanya menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Sehingga tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan telah terjadi suatu pergeseran ke arah kepentingan anak. Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum pernah ada sampai saat ini.²⁶

Pengangkatan anak mempunyai peraturan hukum adalah sebagai berikut :

²⁴Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h.59.

²⁵ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 30.

²⁶*Ibid*, h.32

Pengangkatan anak sebagai berikut : a.Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. b.Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

1. *Staatsblad* 1917 nomor 129 pasal 5 sampai pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata yang ada dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.²⁷
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tertanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan Negeri²⁸
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983 mengenai permohonan pengesahan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat.²⁹ Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 14 juni 1985.³⁰
4. Keputusan ini juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.³¹
5. Bab VIII bagian kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.³²

²⁷ Muderis Zaini, Adopsi, h. 33.

²⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007*, (Jakarta : 2007), h. 275.

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*.

³¹ <http://oasis-pencitailmu.mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah.blogspot.com/> (Juli,2012).

³² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), cet 1, h.269.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak berlaku mulai 8 februari 2005.³³
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 merupakan wewenang Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Sesuai dengan pasal 49
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.”³⁴

Kewenangan Pengadilan Agama pemohon pengangkatan anak lebih dikhususkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 49 beserta penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum).³⁵

Dari berbagai aturan tersebut harus dipilih mana yang masih berlaku setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, dan mana yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam dalam pengangkatan anak. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan SEMA No.6 tahun 1983 jo PP No.54 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang semuanya bersifat saling melengkapi.³⁶

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, maka dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang

³³Mahkamah Agung, *Himpunan*, h. 760.

³⁴Hadi Setiadi Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Harvarindo, 2010), h.37.

³⁵Mahkamah Agung, *Himpunan*, h. 760.

³⁶*Ibid*,

Peradilan Agama diatur juga pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 anak-anak berhak memperoleh perlindungan, anak yang cacat fisik , mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya, anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma³⁷

Gambaran permasalahan PP No. 54 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menjadi hal yang menarik perhatian penulis untuk mengetahui lebih jauh, bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Medan. Penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Medan (studi terhadap perkara tahun 2008 s/d 2010)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Medan penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007?
2. Apa dampak penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 terhadap status anak angkat?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya pemahaman yang berbeda oleh pembaca maka penulis membuat batasan istilah dengan memberikan penjelasan yang terdapat pada judul penelitian ini, sebagai berikut:

³⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan*, h. 760

1. Implementasi : Merupakan pelaksanaan.³⁸
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 : Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Anak angkat adalah : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab untuk perawatan, pendidikan, dan membesarkannya dan masuk kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³⁹
4. Pengadilan Agama Medan: Badan Peradilan Agama yang menanggapi kasus perkara khusus masyarakat muslim
5. Analisis : Meneliti peraturan-peraturan pengangkatan anak yang sudah ada disesuaikan dengan PP No. 54 Tahun 2007

Penulis membatasi penelitian mengenai perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan perkara dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

D.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 terhadap status anak angkat.

E.Kegunaan Penelitian

Dewasa ini kesadaran masyarakat muslim di Indonesia semakin meningkat untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini terlihat jelas dengan semakin banyaknya masyarakat muslim yang mengajukan

³⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 427.

³⁹Pagar, *Himpunan* ,h.420.

permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Medan. Dengan diberikannya wewenang kepada Pengadilan Agama Medan untuk memutuskan perkara pengangkatan anak, sudah seharusnya proses pengangkatan anak tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Dari segi hukum, penelitian ini berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti prosedur yang tidak benar, pemalsuan data, perdagangan anak bahkan jual beli organ tubuh anak, sehingga dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan bagi masyarakat muslim Indonesia bahwa permohonan pengangkatan anak bagi umat Islam hendaknya diajukan ke Pengadilan Agama Medan, bukan ke Pengadilan Negeri yang tidak berpedoman kepada syariat Islam.

F.Landasan Teoritis

Untuk menganalisis penulis dalam penelitian ini ada 3 (tiga) teori yang penulis pergunakan

1.Hirarki Perundang-undangan

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.⁴⁰

Dalam menyelesaikan persoalan diatas maka diperlukan Undang-undang Peradilan Agama yang harus dibentuk dan dikeluarkan dengan berbagai alasan adalah sebagai berikut:

⁴⁰Sulaikin Lubis, et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), cet 1, h. 20.

1. Alasan Filosofis, cita-cita dan pola pikir masyarakat Indonesia sejak Islam datang, sampai dewasa ini dipengaruhi ajaran Islam. Akibatnya sistem hukum dalam masyarakat tertransformasi dalam Hukum Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pelaksanaan agama dijamin yaitu dengan menyelenggarakan atau melaksanakan Peradilan Agama.
2. Alasan sosiologis, dalam melaksanakan ajaran agama masyarakat Islam banyak menghadapi persoalan hukum, persoalan hukum itu antara lain sengketa benda perkawinan, sengketa dalam perkara waris perkara wakaf yang memerlukan penyelesaian yuridis yaitu melalui lembaga Peradilan Agama.
3. Alasan yuridis, UUD 1945 Pasal II aturan Peralihan yang meliputi Hukum produk Legislasi Kolonial, hukum adat, hukum Islam.⁴¹

Pengadilan Agama berfungsi menentukan pandangan masyarakat, kemudian lahirilah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah lompatan raksasa dari segi perundang-undangan, dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka terjadi semacam restrukturisasi Pengadilan-pengadilan Agama yang ada dan menyatukannya kedalam satu struktur yang baru.

Namun dalam hukum Islam penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia No 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan “bahwa anak angkat ialah pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.”⁴²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berkaitan juga dengan pengangkatan anak pasal 39 adalah sebagai berikut :

⁴¹ *Ibid*, h. 19.

⁴² *Undang-undang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Medan: Duta Karya, 1995), cet 1, h. 59, 111.

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
 - 5) Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- menentukan bahwa calon orang tua angkat seagama dengan calon anak angkat.⁴³

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dilihat aspek perlindungan dan kepentingan anak lembaga pengangkatan anak (*tabanni*) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (*adopsi*) yang dikenal hukum sekuler, dimana perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak angkat dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. Pengangkatan dalam pengertian *tabanni* menurut hukum Islam status anak angkat hanya mendapatkan nafkah, kasih sayang sebagai anak lainnya, tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena hati nurani orang tua angkat tetap anak sulit memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu pengertian anak angkat menurut Mahmud syaltut

⁴³Hadi Setiadi Tunggal, *Undang-undang*, h. 58,110.

lebih dekat pengertiannya kepada anak asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.⁴⁴

2. Teori Maslahat

Para filosof, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia dengan *zoon politicon*, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat. Menurut Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M), manusia itu (pasti) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula.⁴⁵ Dalam Alquran mempunyai dua bentuk sumber hidayat yang penting adalah sebagai berikut:

1. Sumber ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya yang melingkupi segala bidang. Kandungan ilmu pengetahuan itu akan dapat membawa manusia yang berhasil menggalinya untuk menguasai rahasia alam, dapat hidup di dalamnya dan bahkan dapat menguasai alam itu sendiri. Ilmu pengetahuan itu akan menunjuki-nya dalam kehidupan dunia dan akhirat.
2. Dalam bentuk tata aturan dalam kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah Pencipta, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia, yang akan menjamin kemaslahatan kehidupan umat baik di dunia maupun akhirat.⁴⁶

Muhammad Amin Summa mengutip buku Prof. Wahbah Az-Zuhayli, guru besar Universitas Islam Damaskus memformulasikan hubungan keluarga dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) seperti nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.⁴⁷ Hubungan hukum yang melibatkan sesama anggota keluarga dan masih dalam sebuah keluarga.

⁴⁴ Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet.1, h. 26,28.

⁴⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo: 2004), h.1.

⁴⁶ Zaini Dahlan et,al, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: cet 2, 1992), h. 29

⁴⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum*, h. 19.

Pemeliharaan anak dengan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa. Keterlibatan orang tua angkat terhadap pemeliharaan anak tidak hanya dilakukan di waktu kecil, akan tetapi berlanjut hingga mencapai usia dewasa. Orang tua angkat harus memberitahukan orang tua kandung mengenai perkawinan anak perempuan angkatnya yang melakukan pernikahan masih tetap bergantung pada perwalian ayah kandung atau keluarga dekat.⁴⁸

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berlaku dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang harus diperhatikan dalam adopsi adalah pengangkatan anak agar tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dimana orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul si anak dan siapa orang tua kandung si anak.

3. Hak-hak anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak atas kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Berhak atas suatu nama sebagai tindakan identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua

⁴⁸*Ibid*, h. 26.

⁴⁹Pagar, *Himpunan*, h. 430.

4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
9. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁰

G.Kajian Terdahulu

Penelitian maupun pembahasan mengenai persoalan pelaksanaan pengangkatan anak dan kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 belum banyak dibahas selama ini, namun penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan dimaksud.

Tresna Hariadi, dalam tesisnya berjudul “Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (studi pada Pengadilan Agama)” menekankan tentang pandangan Hukum Islam dan pengadilan Agama Medan dalam

⁵⁰ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 219.

menentukan warisan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat⁵¹

Farida Ariani, dalam skripsinya berjudul “Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam di Indonesia menganalisa kasus Penetapan Agama Simalungun Nomor 9/Pdt.P/2008/PA Simalungun dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, membahas tentang ketiadaan Undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam telah menimbulkan polemik dan kebimbangan dalam masyarakat muslim⁵²

Muhammad Yasir Nasution dengan judul tesis “Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Permohonan Pengangkatan Anak (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama)” yang meneliti apakah Peradilan Agama berkompeten untuk menyelesaikan permohonan pengangkatan anak kendatipun dari sisi perundang-undangan belum melegitimasi kewenangan tersebut kepada Peradilan Agama. Dan sejauh mana kekuatan mengikat putusan Peradilan Agama tersebut⁵³

Khairuman, dalam tesisnya berjudul “Putusan Pengadilan Agama Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)”.⁵⁴

Armidin Rihad menulis artikel berjudul “Perluakah memberitahu Status Anak adopsi?” yang dimuat di media kompasiana tanggal 12 Juli 2011.⁵⁵

⁵¹Tresna Hariadi, *Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (Studi pada Pengadilan Agama Medan)*, (Tesis, Medan, Magister Kenotariatan, USU, 2004).

⁵²Farida Ariani, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia menganalisa kasus Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 9/Pdt.P/2008/PA Simalungun dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, (Tesis, Jakarta, FHUI, 2009).

⁵³M.Yasir Nasution, *Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Permohonan Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sumatera Utara)*, (Tesis, Medan, IAIN, 2011).

⁵⁴Khairuman, *Putusan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)*, (Tesis, Medan, USU, 2004).

⁵⁵Armidin Rihad, “Perluakah memberitahu Status Anak adopsi?” dalam *Media Kompasiana* (12 Juli 2011).

Tesis penulis yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Perkara Pengangkatan Anak Tahun 2008 sampai dengan 2010).

H. Metode Penelitian

1. Penelitian

Penelitian ini bersifat doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum tipe penelitian doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis tentang peraturan pemerintah kategori fakta yang resmi, menganalisa hubungan antara peraturan dengan peraturan lainnya, menjelaskan kesulitan dan kemungkinan perkembangan selanjutnya. Contoh penelitian doktrinal misalnya kontrak antara suatu perusahaan tertentu dengan perusahaan penyediaan tenaga kerja. Perancang naskah akademis UU Transaksi Elektronik misalnya perlu melakukan penelitian mengenai filosofi saat terjadinya perjanjian yang menjadi dasar transaksi tersebut, kecapan pembuatan perjanjian, dan lain-lain, yang semuanya dapat ditelusuri dari buku-buku hukum (*treatises*), khususnya di bidang perjanjian. Baik perancang perjanjian atau naskah akademis suatu Rancangan Undang-Undang tidak dapat “mengarang” seenaknya melainkan harus berdasarkan prinsip, doktrin, atau filsafat hukum tertentu.⁵⁶

2. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini berdasarkan metode study perkara (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap perkara yang terjadi, dengan cara melakukan

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), cet 1, h. 7, 32.

penelitian terhadap perkara di Pengadilan Agama dari tahun 2008 sampai dengan 2010.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁷
- b. Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁵⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penerapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 dilihat dari perkara tahun 2008 sampai dengan 2010.

Adapun data-data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.97

⁵⁸ *Ibid*, h.98.

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
- b. Bahan hukum sekunder sebagai berikut:
 - 1) Buku pustaka yang mendukung penelitian ini
 - 2) Hasil karya ilmiah
 - 3) Putusan perkara pengangkatan anak tahun 2008 sampai 2010
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan pada penelitian penerapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak dan mendukung bahan primer dan bahan sekunder.

Agar memiliki keseragaman dalam hal penulisan, peneliti berpedoman kepada Panduan Peneliti dan Tesis PPs IAIN Sumatera Utara yang diterbitkan oleh PPS IAIN Sumatera Utara tahun 2010.

I.Sistematika Pembahasan

Penulis menguraikan dalam bentuk tulisan, yang disusun secara sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing mempunyai beberapa pembahasan yang disebut sub bab, guna memperjelas ruang lingkup dan permasalahannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari sub bab meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah , Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teoritis, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II menguraikan mengenai Pengangkatan Anak dalam Sejarah Peradaban Manusia, Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Peradaban Islam, Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Tradisi Adat Di Indonesia, Sejarah Pengangkatan anak Dalam Peradaban Barat.

Bab III menguraikan Pengangkatan Anak dalam Ragam Sistem Hukum, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Pengangkatan Anak Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi

Hukum Islam, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata.

Bab IV membahas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 di Pengadilan Agama Medan. Dampak penerapan PP No. 54 Tahun 2007 terhadap status anak angkat, Hasil Penelitian Terhadap Perkara Pengangkatan anak Tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan, Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Bab V yang merupakan bagian akhir sebagai penutup dari penelitian ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

PENGANGKATAN ANAK DALAM SEJARAH PERADABAN MANUSIA

A. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Peradaban Islam

Historis, Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw.. Muderis Zaini dalam bukunya mengutip penjelasan Mahmud Syaltut “bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India.” Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan tabanni dalam pengertian mengambil anak.⁵⁹

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “tabanni” yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak. Pengangkatan anak dalam pengertian diangkat sebagai anak ini berakibat hukum pada putusannya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung, dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.⁶⁰ Berkaitan dengan pengangkatan anak ini dijelaskan dalam QS. *al-Ahzab* ayat 4



“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar⁶¹ itu sebagai ibumu, dan

⁵⁹Muderis Zaini, *Adopsi*, h 53.

⁶⁰Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h.18.

⁶¹Departemen Agama, *Al-Qur’ân dan Terjemahan*, (Bandung: Dipenogoro, 2008) .

dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Muhammad Ali As-ḥabuni mengungkapkan surat *al-Aḥzab* dalam Tafsir Ayat al-Aḥkām adalah sebagai berikut:

لا يمكن أن تصبح الزوجة المظاهر منها أمًا، ولا الولد المتبني ابنًا، لأنَّ الأمَّ الحقيقية هي التي ولدته و الإبن الحقيقي هو الذي جاء من صلب ذلك الرجل فلا يمكن للإنسان أن يكون له أبوان

Tidak mungkin yang bukan istri dipanggil ibu dan tidak mungkin yang mengangkat aku anak/mengangkat anak dipanggil anak karena ibu yang sebenarnya adalah yang melahirkannya. Dan anak pada hakekatnya adalah yang datang dari tulang sumsum seorang laki-laki. Maka tidak mungkin seorang anak mempunyai 2 orang ayah.”⁶²

Pengertian tersebut untuk menyatakan anak angkat tidak bisa sama persis dengan anak kandung, dan ibu angkat tidak juga dipersamakan dengan ibu kandung. Namun pada masa Jahiliyah anak angkat mempunyai hak sama dengan anak kandung. Tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu, hal ini bukan melarang pengangkatan anak atau menjadi ayah/ibu asuh, yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak serta status hukum seperti anak kandung. Anak-anak angkat kamu, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, tetapi yang dicengah adalah mempersamakannya dengan anak kandung.

Oleh sebab itu orang Arab selalu mencantumkan bin/binti mereka. Bin/binti menunjukkan nama bapak, kakek dan moyang mereka, dengan demikian seseorang dapat mengetahui dengan pasti garis keturunannya. Meletakkan bin/binti di belakang nama tidak dapat disamakan dengan penggunaan nama keluarga seperti nama marga siregar, nasution dan sebagainya. Karena anak

Zhihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya: ‘punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku’ atau perkataan lain yang sama maknanya. Adat kebiasaan orang Arab jahiliyah apabila ia berkata demikian kepada istrinya maka istrinya itu haram baginya untuk selam-lamanya. Setelah islam datang, maka yang haram untuk selamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar *kaffarat* (denda)

⁶² Muhammad Ali As-ḥabuni, *Tafsir*, h.185.

perempuan Arab tetap menggunakan binti ayahnya walaupun ia sudah menikah. Ia tidak menggantikan nama ayahnya dibelakang namanya dengan nama suami.

Sementara pengangkatan anak dalam pengertian “*ta’wun*” adalah menanggung nafkah anak, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, yang dilakukan orang yang mampu memperhatikan kebaikan walaupun ia tidak dianugerahkan anak. Anak angkat bukan sebagai anak kandung ataupun anak pertama dari perkawinan. Islam menggugurkan pengangkatan anak jika menghilangkan nasab si anak, dan Islam tidak mengakui adanya pengangkatan anak yang dipraktikkan oleh masyarakat jahiliyah.

Nabi Muhammad saw. pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Hârîtsah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Hârîtsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad saw. mengumumkan di hadapan kaum Quraisy dan berkata:”Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku pun mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad saw. tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.⁶³

Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad saw.. Zaid bin Hârîtsah bin Syarahil bin Ka’b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa ke Makkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad . Umur Zaid saat itu sekitar 8 (delapan) tahun. Setelah Nabi Muhammad saw. menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencari Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka’b bin Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad

⁶³M.Quraish Shihab, *Tafsir*, h. 221.

saw. untuk menembusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad saw., bersabda bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad saw. memberikan opsi kepada Zaid untuk pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad saw., Zaid memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad saw. dan menyatakan bahwa meskipun di berstatus merdeka pergi bersama keluarganya tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad saw. karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.⁶⁴

Dengan diturunkannya QS. *al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang membatalkan anak angkat Nabi dan semua pengangkatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim, dengan turunnya surat ini Nabi memperingatkan semua orang agar tidak mengakui mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Beliau bersabda “Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga baginya haram”.⁶⁵

Sejarah hidup Rasulullah saw. (sebelum keNabian di atas), sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Hârîtsah dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah swt.. Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Hârîtsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi saw., oleh istrinya Khadijah sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga maka Zaid bin Hârîtsah meminta izin kepada Nabi saw. untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi saw. tetap menyuruhnya dan mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad saw. memperkenalkan perceraian mereka.⁶⁶

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir*, h. 221.

⁶⁵ *Ibid*, h. 218.

⁶⁶ *Ibid*,

Setelah beberapa waktu Zaid sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga Rasulullah saw. memperkenankan perceraian mereka. Setelah habis masa iddah⁶⁷ Zainab, Nabi Muhammad saw. diperintahkan oleh Allah swt. untuk mengawininya. Dalam hal ini Allah swt, berfirman”.... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia .⁶⁸

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. *al-Ahzab* ayat 37 “Dan (ingatlah) ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya:”Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁶⁹

Perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Pengangkatan anak dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhâri dan Muslim: Dari Abu Dzar ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

⁶⁷Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang perkawinannya putus karena perceraian atau kematian.

⁶⁸ Maksudnya setelah habis iddah nya

⁶⁹*Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang, CV.Asy Syifa',2000), h. 934.

Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.”⁷⁰

Dari Saad bin Waqqâsh ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: ”Barang siapa mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.”⁷¹

Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut *’al-Latiqh*” yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukannya mengakui sebagai anak, maka nasab anak itu dapat di nasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.⁷²

Andi Syamsu dan Fauzan dalam bukunya mengutip Zakaria Ahmad Al-Bary,

“Mengangkat anak yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya tanpa berakibat hukum seperti pengangkatan anak zaman jahiliah adalah menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif dan dilakukan oleh beberapa orang sebagai *fardu kifayah*. Hukumnya berubah menjadi *fardhu ‘ain* apabila seorang menemukan anak terlantar atau terbuang di tempat yang sangat membahayakan nyawa anak itu, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dijaga dan dipelihara.”⁷³

Status anak angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan memakai nama ayah kandung atau orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya.⁷⁴ Hukum Islam mengakui pengangkatan anak dalam

⁷⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir*, h..

⁷¹ *Ibid*,

⁷² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 24.

⁷³ *Ibid*,

⁷⁴ *Ibid*,

pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam beribadah kepada Allah swt.

Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka banyak hak diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam QS. *an-Nisa* ayat 23

1. Ibu, nenek dari bapak atau dari ibu, dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah
3. Saudara perempuan sekandung, seapak dan seibu
4. Anak perempuan saudara laki-laki (sekandung, seapak, dan seibu).
5. Anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seapak, dan seibu)
6. Saudara perempuan bapak, kakek dan seterusnya ke atas
7. Saudara perempuan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.⁷⁵

Uraian diatas merupakan larangan mempersamakan status anak angkat dengan anak kandung. Untuk menghilangkan tradisi jahiliyah dinyatakan Panggilah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan mengandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka, itulah yang lebih dekat untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah swt. dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila anak angkat itu telah memeluk agama Islam atau maula-maula, kami yakin orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa kamu terhadap apa yang kamu khilaf padanya antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang Kami perintahkan ini, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu.” Larangan pengangkatan anak dengan akibat hukum diatas adalah saling mewarisi dan memanggil anak sebagai anak kandung. Jelaslah jika mengangkat anak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kehadiran anak angkat tidaklah dilarang.⁷⁶

⁷⁵*Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 173.

⁷⁶R. Soetjoprawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Airlangga University Press, 2002), h 108.

B. Sejarah Pengangkatan Anak Menurut Tradisi Adat Indonesia

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, ialah suatu perbuatan yang memunggut seorang anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin ikatan sosial.⁷⁷ Hukum adat memandang kekeluargaan dan keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Pandangan mengenai keturunan merupakan unsur yang diinginkan serta mutlak bagi suatu klan, suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Adat suatu klan, suku atau kerabat khawatir akan menghadapi kepunahan, mereka melakukan pengangkatan anak. Masyarakat Indonesia asli juga mengenal pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat, dikenal dengan sistem kekeluargaan, dimana keturunan merupakan unsur yang hakiki dan mutlak bagi pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak sebagai generasi penerusnya.⁷⁸

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga asing, dimana pengangkatan anak mempunyai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Untuk memperat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat. contohnya adanya unsur hubungan kekeluargaan pada suku batak diangkat dari dongan sabutuha (teman semarga), huluhula (keluarga dari pihak istri, boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki).
3. Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim atau yatim piatu.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (panutan, sebagai pemancing)

⁷⁷ R. Soetjopradi, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h.108

⁷⁸ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 28.

5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
6. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Menurut hukum adat tentang tata cara, perbuatan pengangkatan dapat dilakukan dengan dua cara adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan secara terang dan tunai

Terang maksudnya adalah pengangkatan anak tersebut dilakukan dimuka pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat.

Tunai maksudnya pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan pemberian barang-barang berkhasiat kepada keluarganya semula menurut hukum adat setempat. Dengan pemberian tersebut putuslah hubungan dan ikatan dengan keluarga semula, dan anak menjadi anggota baru dari keluarga yang mengangkat. Pengangkatan anak bukan hanya urusan dari keluarga yang bersangkutan tetapi juga merupakan urusan dari *clan* yang mengambil anak tersebut, karena anak yang diangkat berasal dari *clan* orang yang mengangkat.⁷⁹

b. Dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai.

Maksudnya tidak terang dan tidak tunai adalah untuk pengangkatan anak tidak diperlukan suatu cara tertentu, sehingga tidak perlu adanya campur tangan dari anggota keluarga atau Kepala Desa agar pengangkatan anak tersebut menjadi terang atau dengan pembayaran kepada keluarga asal anak yang diangkat. Dimana Hukum Adat dalam melaksanakan

⁷⁹Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006), h. 20.

pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mempunyai hukum adatnya masing-masing.⁸⁰

Muderis Zaini dalam bukunya mengutip Prof. Dr. R. Soepomo Hukum Adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat mempunyai ikatan dan kebersamaan kemasyarakatan yang erat meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak keagamaan yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.⁸¹

Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Pengangkatan anak dalam hukum adat tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun sebagian daerah mengangkat anak mengikuti sistem patrinal yaitu menarik garis keturunan laki-laki, yang dianggap lebih memberikan keturunan daripada anak perempuan, maka anak perempuan tidak bisa dijadikan anak angkat. Anak yang diangkat dilihat dari pertalian darah yang nantinya dapat melanjutkan keturunan dan harta kekayaan anak juga bergantung apakah berdasarkan hukum pertalian darah atau tidak. Kedudukan anak tersebut masih dipengaruhi oleh perlakuan dan pertimbangan.⁸²

C. Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Peradaban Hukum Barat

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjadi landasan Hukum Barat, tidak mengenal sistem pengangkatan anak. Dengan berlakunya Kitab

⁸⁰<http://muvid.wordpress.com/2008/01/09/adopsi-anak-pasca-perubahan-UU-pa-dualisme-pengadilan.negeri-dengan-pengadilan-agama-benarkah> (April, 2012).

⁸¹Muderis Zaini, *Adopsi*, h 53.

⁸²*Ibid.*, h. 34.

Undang-undang Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa, diberlakukan pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak yang erat kaitannya dengan adat Tionghoa. Tetapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk golongan Tionghoa tidak sesuai dengan pandangan, kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat Tionghoa. Untuk memenuhi kebutuhan adat yang erat kaitannya dengan pandangan religius mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad*.

Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena nama keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, oei,lim dan lain-lain) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Jika pasangan suami/istri tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh sebab itu asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang laki-laki, karena anak laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidaklah punah dan keturunan laki-laki yang melanjutkan merawat abu leluhur.⁸³

Setelah perang dunia ke II, Hukum Barat menerima Undang-undang Adopsi (*Indische Staatsregeling*). *IS* (*Indische Staatsregeling*) merupakan aturan pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan *Staatsblad* 1925 nomor 415 dan 416 tanggal 23 Juni 1925. *IS* mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1926.⁸⁴

Staatsblad 1925 nomor 577 pasal 131 *IS* ayat 2 sub a merupakan dasar berlakunya *Burgelijk Wetboek (BW) Nederland* di Indonesia yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia pada waktu itu.⁸⁵ Kitab undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud pada pasal 131 tersebut memandang suatu perkawinan

⁸³Musthofa Sy, *Pengangkatan*, h. 23.

⁸⁴Muderis Zaini, *Adopsi*, h.39.

⁸⁵*Ibid.*

Pasal 131 berbunyi “Asas Konkordansi yang diartikan terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata yang berlaku di Belanda”

bukan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Oleh karena itu ia tidak mengenal pengangkatan anak.

Dengan adanya *Staatsblad* 1847 Nomor 23, *BW* berlaku di Indonesia dengan menyesuaikan keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia, khususnya untuk orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia keturunan Eropa, orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa adalah mereka yang pada saat itu beragama kristen.

Burgelijk Wetboek (BW) tidak berlaku bagi orang Indonesia asli. Sejarah pengangkatan anak bagi orang Tionghoa dalam *Staatsblad* adanya penggolongan penduduk pada masa Hindia belanda. Dengan adanya penggolongan tersebut berakibat pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Penggolongan penduduk ini diatur dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang dibagi jadi 3 (tiga) golongan, adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa terdiri dari orang Belanda, orang bukan Belanda yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang-orang lain yang di negara asalnya berlaku hukum keluarga yang pokoknya berdasarkan asas yang sama dengan asas hukum keluarga Belanda, yaitu asas perkawinan monogami dan terlaksana atas persetujuan kedua belah pihak
2. Timur Asing dan Bumi Putera/ Indonesia Asli , terdiri dari semua orang lainnya, seperti orang Tionghoa, Arab, India, Pakistan, Siam dan lain-lain.
3. Golongan Bumi Putera/Indonesia asli, terdiri dari mereka yang termasuk rakyat asli Hindia Belanda yang tidak pindah ke golongan lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan lain tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan Bumiputra. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama Kristen berlaku hukum adat.⁸⁶

Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum perdata (*BW*) bagi golongan Tionghoa ada beberapa pengecualian dan ada pula lembaga yang diberikan pengaturan secara khusus yakni mengenai pengangkatan anak. Lembaga

⁸⁶ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 24.

pengangkatan anak ini diatur secara khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang suatu perkawinan dalam bentuk hidup bersama bukan untuk mendapatkan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (adopsi). Untuk kebutuhan adat sangat erat kaitannya dengan pandangan religius mereka, maka lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam *Staatsblad*.

Penduduk golongan Tionghoa mengalami perkembangan dan perubahan pandangan hidup terhadap hubungan kekeluargaan yang semula patrilineal menjadi bilateral atau parental. Perubahan ini dipengaruhi oleh berlakunya Kitab Undang-undang Hukum perdata, pendidikan, dan agama kristen yang banyak dianut mereka. Lembaga pengangkatan anak ini masih dibutuhkan dengan tujuan yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat terkadang dibutuhkan bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau memelihara mereka di hari tua. Oleh sebab itu pengangkatan anak tidak perlu dibatasi hanya anak laki-laki. *Burgelijk Wetboek (BW)* tidak mengatur pengangkatan anak, namun pada tahun 1956 *Burgelijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgelijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang inilah yang sangat dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. Yang boleh melakukan pengangkatan anak hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak kandung lebih dari lima tahun perkawinan. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak kandung yang dilahirkan diluar perkawinan.⁸⁷

Staatsblad 1917, Nomor 129 pasal 5 menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam keturunan garis laki-laki karena disebabkan kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka boleh mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Pengangkatan

⁸⁷ *Ibid*, h. 26,28.

pasal 15 ayat 2 berbunyi pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dengan cara membuat akte autentik adalah batal karena hukum. Pengangkatan anak perempuan harus melalui putusan Pengadilan dan disertai dengan akte Notaris.

anak menurut *Staatsblad* ini hanya untuk anak laki-laki dilakukan dengan akte Notaris. Ketentuan pengangkatan ini dilakukan hanya untuk anak laki-laki saja yang dianggap dapat memberikan keturunan.⁸⁸

Namun Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) pada tanggal 29 Mei 1963 telah membolehkan mengangkat anak perempuan berdasarkan pasal 15 ayat 2.⁸⁹ Putusan dan penetapan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang dapat menyambung keturunan dan demi kepentingan si anak. Nama keluarga yang mengangkat anak dapat diletakkan dibelakang nama anak angkat dengan menyatakan anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan. Dengan bertambahnya pengetahuan timbullah kesadaran hukum pada masyarakat mengenai adopsi yang lebih mengutamakan pertimbangan dari segi sosial.

Pengangkatan anak dapat mengakibatkan putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi.⁹⁰

Menurut *Staastblad* 1917 Nomor 129 tata cara pengangkatan anak yang sesuai.⁹¹ Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1963 menyatakan pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia berbunyi :

⁸⁸Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 35.

⁸⁹Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 26.

⁹⁰Muderis Zaini, *Adopsi*, h.35.

⁹¹*Ibid*, h.30

pasal 8 sampai pasal 10 adalah sebagai berikut: 1.Persetujuan orang tua yang mengangkat anak. 2.Anak yang diangkat adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua si anak, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya, jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak maka harus ada persetujuan dari walinya serta Balai Harta peninggalan. 3.Jika anak yang akan diangkat itu sudah

Menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Pengangkatan anak dapat dilakukan warga Negara Indonesia yang tidak terkait dalam perkawinan yang sah/belum menikah. Jika seseorang belum menikah atau memutuskan untuk tidak menikah selamanya, sudah menikah atau memutuskan untuk tidak menikah kembali. Maka dapat melakukan adopsi anak.”⁹²

Pengangkatan ini harus didasari dengan kesungguhan , ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan maupun keluarga yang mengangkat, serta kesadaran para pihak akan akibat hukum (*Staatsblad* 1917 No. 129 jo SEMA No.2/1979).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1963 yang mengatur tentang tata cara mengadopsi. Maka orangtua angkat harus terlebih dulu memajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri ditempat domisili anak tersebut.⁹³

berusia 19 tahun maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.4. Seorang perempuan janda ingin mengangkat anak harus adanya persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika tidak mempunyai saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus adanya persetujuan dari laki-laki keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. Pengangkatan ini dapat diganti dengan izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak.

⁹² SEMA No.6 Tahun 1963

⁹³ *Ibid*,

BAB III

PENGANGKATAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang dibentuk dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi hukum Islam.⁹⁴

Pengakuan anak dan pengangkatan anak tidak diakui sebagai lembaga hukum yang sah (berakibat kekeluargaan), namun berstatus amal kebajikan. Menganggap orang lain sebagai ibunya tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu pula perbuatan pengangkatan anak dan menganggap orang lain adalah ibunya adalah permainan omongan manusia, kebohongan, bukan kebenaran sedang Allah swt. menghendaki kebenaran.⁹⁵

Keluarga yang islami terbentuknya satu keluarga yang bukan kecil dan bukan keluarga besar, namun satu keluarga semakin berkembang dan bertambah dalam keluarga dilihat di bidang perkawinan dan kewarisan.⁹⁶ Hubungan antara suami/istri bisa saja tidak kekal dan abadi, namun hubungan antara anak dan kedua orang tua tidak pernah putus. Oleh sebab itulah Islam melarang mengangkat anak, dalam arti mengakui anak sebagai anak kandung.

Alquran memakai nama *walad* (anak) dan *aulad* (anak-anak). Istilah tersebut berkembang anak dari anak dan seterusnya kebawah atau keturunan. Semua keturunan dapat dipanggil *walad* atau *aulad*. Dalam Alquran yang termasuk anggota keluarga adalah *walidain* (kedua orang tua) dan *aqrabun* (kerabat) dalam QS. *An-Nisa* ayat 7 dan 33, dalam QS. *An-Nisa* ayat 8 ada juga

⁹⁴Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h.21.

⁹⁵Ichtiarto, "Sistem Kekeluargaan Islam", dalam *Mimbar Hukum*, Aktualisasi Hukum Islam No.45, (Nopember-Desember, 1999), h.33.

⁹⁶*Ibid*, h 34.

ulul-qurba yang ada hubungan darah dekat, namun di luar kerabat. Dalam QS. *An-Nisa* ayat 23, dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 50 mengawini anak saudara bapak atau saudara ibu (saudara sepupu) dibolehkan oleh Islam karena dalam pandangan Islam anak saudara ibu atau anak saudara bapak adalah bukan keluarga dalam hubungan darah. Demikian pula anak saudara kakek atau anak saudara nenek dari garis bapak dan ibu.⁹⁷

Yang merupakan anggota keluarga dalam sistem kekeluargaan Islam adalah : suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai pemelihara keluarga, *walidaini* (kedua orang tua) yang terdiri dari “*aabaaukum*” (bapak-bapakmu) dan “*ummahaatukum*” dari garis bapak dan ibu, anak-anak beserta keturunannya.⁹⁸ Sistem perkawinan Islam menghasilkan sistem kekeluargaan yang bilateral karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan indogami yang berarti tidak keharusan perkawinan *eksogami*. Sebagai dapat diketahui, norma hukum perkawinan larangan *indogami* atau keharusan perkawinan *eksogami* (perkawinan dengan pasangan di luar lainnya) adalah ciri sistem kekeluargaan unilateral patrilineal dan uniteral matrilineal. Terlihat bahwa sistem kekeluargaan Islam pasti bukan unilateral (patrilineal atau matrilineal), namun adalah bilateral.⁹⁹

Jika keluarga tersebut tidaklah harmonis dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perceraian, apalagi perkawinan yang telah lama namun tidak juga mendapatkan keturunan. Seberapa hebatnya seseorang ia pasti mempunyai kelemahan dan betapapun lemahnya seseorang tentu ada juga unsur kekuatannya. Suami istri yang ingin mendambakan seorang anak yang dinantikan tidak juga ada, suami istri dapat mengambil kesepakatan untuk melakukan pengangkatan anak yang sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Mengadopsi

⁹⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 173, 938.

⁹⁸ Pagar, *Sistem*, h 34,35.

⁹⁹ *Ibid.*,

maksudnya mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹⁰⁰

Pagar dalam bukunya mengutip Peter Salim dan Yenni Salim mengatakan bahwa adopsi itu adalah pengangkatan anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dengan proses hukum. Mengadopsi adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dengan proses hukum, contohnya mereka bermaksud mengadopsi anak laki-laki.¹⁰¹ Yan Pramdy Puspa mengatakan bahwa pengertian anak angkat (adopsi) adalah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.¹⁰²

Maidin Gultom dalam bukunya mengutip Hilman Hadikusuma “bahwa menarik batas antara belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.”¹⁰³

Pengangkatan anak menurut hukum Islam dapat juga dilihat dari segi sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak Menurut Fikih

Pengangkatan anak dalam fikih klasik adalah sesuatu perbuatan yang diperbolehkan, karena Rasul sendiri mempraktekannya dengan mengangkat Zaid Ibnu Hâritsah (seorang hamba yang telah dimerdekakan) menjadi anak angkat beliau. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah ini terhadap Zaid diumumkan di depan kaum Quraisy, ketika itu Rasul berkata “saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid kujadikan menjadi anak angkatku, dan mewarisi, dan aku pun mewarisinya. Sikap Rasul seperti ini masih tercermin dari tradisi yang ada pada waktu itu, karena peristiwa ini terjadi adalah sebelum turun QS. *al-Ahzab* ayat 4-5

¹⁰⁰Pagar, “Kedudukan Anak Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia)”, dalam *Mimbar Hukum* No.5, (Juni-Juli, 2001), h.8.

¹⁰¹*Ibid*,

¹⁰²*Ibid*,

¹⁰³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2008), cet 1 h. 32.

dan 40 yang menjadikan turunnya ayat tersebut. Bahkan setelah ayat ini pun turun Zaid bin Harisah tetap menjadi anak angkat rasul. Demikian juga sikap sahabat yang mendapat persetujuan dari Rasul saw. untuk melakukan pengangkatan anak, misalnya Umayyah mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya. Dengan demikian pengangkatan anak dalam Islam adalah boleh.¹⁰⁴

Sebelum Islam datang, tradisi pengangkatan anak ini telah membudaya misalnya saja pada masa jahiliyah telah ditemukan praktek-praktek pengangkatan anak, orang Arab pada masa ini telah akrab dengan kebiasaan ini. Sudah ada contoh-contoh orang yang berstatus sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Dibanding dengan pengangkatan anak dalam Islam maka pengangkatan anak pada masa jahiliyah terlihat lebih mendapat tempat istimewa. Dikatakan demikian karena masyarakat jahiliyah memperlakukannya mereka menghukumkannya sama dengan anak kandung, contohnya salah satu saling mewarisi bagi mereka adalah adanya pengangkatan anak yang mereka sebut dengan tabanni, sedang anak perempuan tidak mewarisi demikian juga dengan anak kecil, mereka menetapkan hukum putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya , tetapi dihubungkan kepada orang tua angkatnya.¹⁰⁵

Fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Berdasarkan Hadis Rasulullah bersumber dari Ibnu Umar yang artinya:

“Seorang laki-laki telah meli’an istrinya pada zaman Nabi Muhammad saw., dan menafikkan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad menceraikan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya”.(HR. Al-Bukhâri dan Abu Dâud).¹⁰⁶

Menurut Fikih Islam anak zina atau anak luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sebagaimana yang terlihat nanti, diikuti oleh UUP dan KHI. Pembuktian asal usul anak, UUP di dalam pasal 55.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pagar,”*Kedudukan Anak Dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia)*”, dalam *Mimbar Hukum* No.5, (Juni-Juli, 2001), h.8.

¹⁰⁵ *Ibid*,

¹⁰⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet 1, h. 280.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 282.

Pengertian anak dalam Islam berbeda dengan pengertian anak dilihat dari ilmu hukum, anak dalam Islam merupakan makhluk ciptaan Allah swt. yang mulia mempunyai unsur-unsur ilmiah. Hak dan kewajiban anak kandung maupun orang tua dan sebagai ibu yang sudah melahirkan seorang anak yang tidak pernah mungkin bisa diingkari. Menurut hukum Islam, anak perempuan pada saat akan menikah memerlukan kehadiran ayah kandung sebagai wali.

Sedangkan menurut Darwin dan Agustcomte melihat anak dari lembaga hukum segi sosial, budaya dan ekonomi, anak yang diangkat memperoleh harta dari ayah angkat yang merupakan proses peradaban status anak dan hak-hak anak dengan prinsip perjuangan untuk hidup yang kuat akan bertahan. Dilihat dari segi sosiologis, akibat pengangkatan anak dapat menimbulkan kedengkian dan mempunyai sifat iri diantara saudara dan kerabat dan dapat memutuskan hubungan persaudaraan sehingga anak angkat berhak memakai nama orang tua angkat.¹⁰⁸

Pengangkatan anak mempunyai 2 pengertian adalah sebagai berikut:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung. sehingga anak angkat berhak memakai nama keturunan hubungan darah (nasab) orang tua kandung.
2. Mengangkat anak dimana si anak diperlakukan oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung,¹⁰⁹

Pasal 55 menegaskan: 1.Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 2.Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. 3.Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹⁰⁸M.Quraish Shihab, *Membumikan*, h. 345.

Statement ini mengandung pewarisan anak sebagian generasi penerus agama, bangsa, dan negara harus dipersiapkan menjadi manusia yang tangguh cerdas, dan mandiri. Statement tersebut tidak sistem hukum dalam sosialisasi kehidupan tata pergaulan masyarakat di tingkat regional maupun dunia International.

¹⁰⁹A.Azizi Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1 h. 29-30.

Setelah Islam datang, tradisi pengangkatan anak ini tetap dapat diterima tetapi dengan modifikasi status dan keberadaannya. Pengangkatan anak tetap boleh dilakukan, tetapi dengan status dan keberadaan sebagai berikut:

- 1) Status nasab anak tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dihubungkan kepada orang tua kandungnya.
- 2) Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antar anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka. Penempatan status anak angkat dijelaskan dalam QS. *al-Ahzab* ayat 4,5, 40.

Melalui peristiwa *asbāb al-nuzūl* dari ayat Alquran tersebut dapat dipahami bahwa :

”Pengangkatan anak itu boleh dilakukan karena secara langsung telah dilaksanakan oleh Rasul saw. sendiri tetapi tidaklah merubah status nasab seseorang karena Allah swt. telah menyatakannya di dalam Alquran bahwa status nasab Zaid itu tidaklah boleh dinisbahkan kepada Muhammad saw.”¹¹⁰

Pengertian nasab dalam bahasa diartikan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Penulis mengutip melalui internet masih menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islamiyyu wa adillatuh*, nasab dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nasab *ridha* (susuan) berbeda pengertian dengan anak angkat, karena dilihat dari batasan aurat seperti adik beradik kandung dalam firman Allah swt., (antara yang haram kawin adalah) ibu-ibu mu yang telah menyusukan kamu dan adik beradik susuan kamu dalam QS. *An-Nisa* ayat 23.¹¹¹
2. *Hadhanah* (pemeliharaan) adalah mendidik dapat diartikan menjaga, memimpin serta mengatur kehidupannya sampai si anak dapat mengatur dirinya sendiri. Orang-orang yang dapat melakukan *hadhanah* sebagai berikut:

¹¹⁰Pagar, *Kedudukan*, h.10.

¹¹¹*Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.173.

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
 - b. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat pihak yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan bapaknya.
 - c. Seorang jika melakukan hadhanah ia harus berakal, menjalankan agama.
3. *Walayah* (perwalian atau perlindungan) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali dan pemeliharaan, pengawasan anak yatim dan hartanya terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹¹²

Melakukan pengangkatan seseorang dilarang mengingkari nasab anak-anaknya sendiri, maka ia sendiri tidak boleh mengakui anak dari orang lain sebagai nasabnya. Islam dalam hal pengangkatan anak yang secara mutlak merupakan pemalsuan nasab (keturunan).

Pemutusan nasab yang disengaja, baik dilakukan oleh orang tua angkat, pihak keluarga orang tua angkat, orang tua kandung, pihak keluarga orang tua kandung, maupun oleh si anak yang telah dewasa dan cakap berpikir merupakan perbuatan yang dilarang. Penggaburan nasab asal usul si anak angkat dalam waktu ke depan konsekuensi yang serius terutama dalam hukum perkawinan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak terhadap anak terlantar
2. Pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antar anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya.

¹¹²[http:// Anak Asuh dan Anak Angkat dan keluarga Muslim blogs.htm](http://AnakAsuhdanAnakAngkatdanKeluargaMuslimblogs.htm) (Oktober, 2011).

4. Jika anak angkat tersebut perempuan maka yang menjadi wali nikah tetap ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 kompilasi hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.¹¹³
5. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan dan pendidikan anak tersebut.
6. Anak angkat yang tidak menerima wasiat, tetapi dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan pasal 209 kompilasi hukum Islam.
7. Untuk melakukan pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat.
8. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak.
9. Pengangkatan anak bagi yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982.
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum Islam. Bahwa orang yang dihubungkan nasab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nasab dengan seseorang yang dihubungkan nasab kepadanya.

¹¹³ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 186.

Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nasab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nasab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut¹¹⁴

2. Pengangkatan anak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pengangkatan anak menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang selama ini dilakukan oleh masyarakat muslim masih dengan secara diam-diam atau dengan upacara tradisional/kebiasaan saja tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Namun sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan pengangkatan anak perlunya dilakukan penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap si anak.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mempunyai dampak kurang baik, banyaknya penyimpangan atas pelaksanaan pengangkatan anak misalnya: pengangkatan anak tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah jual beli organ tubuh, anak-anak yang belum dewasa dipaksa bekerja, anak-anak seringkali tempat pelampiasan amarah kedua orang tuanya ,contoh dapat dilihat pada masa sekarang anak dengan sengaja diletakkan di atas rel kereta api yang mengakibatkan kaki si anak lumpuh. Terkadang pertengkaran antara orang tua yang menyebabkan anak menjadi sasaran kemarahan. Sehingga kurangnya perkembangan jiwa si anak.¹¹⁵

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arief Gosita mengemukakan “bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencengah

¹¹⁴ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 186

¹¹⁵ *Ibid*,

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.”¹¹⁶

Undang-undang tentang perlindungan anak memberikan perlindungan anak dari kekerasan rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang waris anak, pengasuhan anak juga batas usia menikah bagi seorang anak.¹¹⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi :perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi :perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dampak baik adanya Undang-undang No 23 Tahun 2002, telah membantu bagian hukum adat mulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan. Perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak waris anak pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak.¹¹⁸

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain “pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.” Namun pengaturan itu belum lengkap dan tuntas karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah undang-undang mengenai pengangkatan anak.¹¹⁹

¹¹⁶ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 186

¹¹⁷<http://www/hukum.kompasiana.com/2011/09/08> aspek hukum-perlindungan anak-direktur-pkpa-ahmad-sofian-sh-ma/(Maret, 2012).

¹¹⁸Pagar, *Himpunan*, h. 272.

¹¹⁹ Pagar, *Himpunan*, h, 292.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasam perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencengah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Prof Pagar mengutip Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”¹²⁰

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara misalnya mencengah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.¹²¹

Jika syarat tersebut sudah terpenuhi baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain maka sahlah pengakuan anak angkat tersebut secara hukum.

Sebagaimana pendapat Majelis Ulama dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 pengakuan anak secara umum diperlukan syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat maksudnya adalah menurut Hukum Islam
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam
- c. Pengangkatan anak angkat tidak mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh sebab itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali. Maka ayah/ibu angkat jika ingin

¹²⁰ Pagar, *Himpunan*, h, 292.

¹²¹ *Ibid*,

memberikan apa saja kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada saat anak angkat dan ayah/ibu angkat masih hidup sebagai hibah.¹²²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan)
- 2) Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung adalah bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan martabat bangsa. Adapun adopsi yang dilarang adalah adopsi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama. Oleh karena itu pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang dari negara non muslim dilarang.

Pengakuan ayah/ibu menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri tidak dapat merubah status orang luar menjadi status kerabat dan tidak menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri.¹²³

Sebelum lahirnya Undang-undang No.14 Tahun 1970 terdapat *rechtsvacuum* mengenai wewenang tingkat kasasi dilingkungan Peradilan Agama. Oleh sebab itu Menteri Agama RI mengeluarkan surat keputusan No.10 Tahun 1963 yang memberi wewenang dan kewajiban kepada jawatan Peradilan Agama (sekarang Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama) untuk melaksanakan tugas Peradilan Agama ditingkat Kasasi. Setelah berlakunya Undang-undang No.14

¹²²Sumber perkara di Pengadilan Agama Medan.

¹²³ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h, 40.

Tahun 1970 tentang pokok Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Menteri Agama tersebut dicabut dengan SK Menteri Agama No.28 tahun 1972¹²⁴.

Pada masa itu pemerintah menyusun suatu Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan pasal 63 yang menunjukkan lembaga Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa perkawinan diantara orang Islam pada satu sisi menunjukkan kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dan kokoh. Namun pada periode ini masih terdapat kekurangan, yaitu masih diperlukan adanya pengukuhan Putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dikeluarkan peraturan yaitu:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990, tanggal 12 Maret 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan sesuai Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Tahun 1989
3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.¹²⁵

Mengenai Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Dalam sejarah pembuatan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam pasal 62 adalah sebagai berikut :

- 1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.

¹²⁴Sulaikin et.al, *Hukum*, h. 34.

¹²⁵*Ibid*, h. 36.

- 3) Anak yang diangkat sekurang-kurangnya harus 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- 4) Apabila anak yang diangkat itu masih saudara dari suami istri dalam hubungan keluarga dia tidak boleh mempunyai derajat kekeluargaan yang lebih tinggi dari suami yang mengangkatnya
- 5) Untuk pengangkatan anak diperlukan izin dari orang tua atau walinya dan persetujuan anak itu sendiri apabila ia sudah berumur 15 (lima belas) tahun.
- 6) Pengangkatan anak dilakukan dengan keputusan Pengadilan atas permohonan suami istri yang mengangkat anak itu.
- 7) Permohonan pengangkatan yang dimaksud ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan itu menguntungkan kepentingan anak yang diangkat.
- 8) Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya.
- 9) Pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan sememda garis ke atas dan ke samping.
- 10) Pengangkatan anak dapat dicabut kembali oleh keputusan pengadilan atas permohonan anak yang diangkat demi kepentingannya. Permohonan pencabutan diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari suami dan istri yang mengangkatnya.
- 12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan yang dimaksud ayat (9) pasal ini, hidup kembali karena pencabutan.

Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk salah satu pasal yang mendapatkan reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam.¹²⁶

Hasil musyawarah Ulama Jawa pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan pasal 62 tersebut untuk diubah sebagai berikut :

Ayat-ayat (1) sampai dengan (7) tidak ada usul perubahan.

Ayat (8) kata-kata “sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan.”

Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”.

Ayat (10) tidak ada usul perubahan.

Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada

Ayat (9)

Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.¹²⁷

Selanjutnya Rancangan Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai legal product dengan menghapus semua ketentuan pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.¹²⁸

Sesuai dengan buku 1 hukum perkawinan dilihat pasal 103¹²⁹ dimana orang tua kandung dapat mengetahui asal usul si anak, begitu pula si anak dapat mengetahui orang tua kandung.¹³⁰ Pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu kita melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

¹²⁶ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 31.

¹²⁷ *Ibid.*, 32.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Pasal 103: 1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, 2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. 3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

¹³⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Duta Karya Medan, 1996), cet 2, h. 91.

1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasal tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak.¹³¹

Hal ini yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 pasal yaitu pada pasal 12.¹³² Pasal ini hanya menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Sehingga tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan telah terjadi suatu pergeseran ke arah kepentingan anak. Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah dimaksud belum pernah ada sampai saat ini.

Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak juga memberikan pengertian anak angkat.¹³³

Pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, hal ini mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.¹³⁴

¹³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia

¹³² Ibid,

Pasal 12 berbunyi: a. Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. b. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. c. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

¹³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, h. 16.

¹³⁴ Ibid, h. 34.

Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan undang-undang yang memadai
3. Istilah yang digunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memadukan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung anak yang bersangkutan.
5. Hubungan harta benda antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat diajarkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agamanya.
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing.
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.¹³⁵

Rancangan Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri. Pengaturan pengangkatan anak ini juga disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹³⁵ Mustofa Sy, *Pengangkatan* , h.33.

Perlindungan Anak, tercantum pada pasal-pasal adalah sebagai berikut pasal 39, pasal 40, dan pasal 41.¹³⁶

Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹³⁷

Ketentuan Peralihan pasal 91 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan :

”Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”¹³⁸

Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 127 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, pengaturan itu masih belum lengkap

¹³⁶ *Ibid*, h. 34.

Pasal 39 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40.

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. 2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, 2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

¹³⁷ Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 35.

¹³⁸ *Ibid*,

dan tuntas, karena masih banyak hal yang seharusnya juga diatur dalam sebuah Undang-undang mengenai pengangkatan anak. Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasar pada aneka ragam ketentuan sebagai dasar hukumnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan kehadiran sebuah perundang-undangan pengangkatan anak yang mengatur secara lengkap dan tuntas.¹³⁹

3. Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Anak angkat dirawat dan dipelihara serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.¹⁴⁰

Pengangkatan anak menurut hukum Islam mempunyai akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan kasih sayang.
- c. Anak Angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- d. Anak angkat tidak dapat mempergunakan nama orang tua angkat secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat.¹⁴¹
- f. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus adanya kepastian hukum mengenai adanya wasiat wajibah.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid*, h.36.

¹⁴⁰ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Medan: Duta Karya, 1996), h.111.

¹⁴¹ Pagar, *Kedudukan*, h. 7,8.

¹⁴² Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 48.

Penentuan status nasab sekaligus penentuan hubungan kewarisan anak angkat dalam *Staastblad* 1917 Nomor 129 pasal 12 menyatakan “persamaan status anak angkat dengan anak sah (anak kandung), kemudian pada pasal 14 lebih diperjelas lagi dengan mengatakan putusanya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.” Dengan demikian segala hak yang dapat diperoleh oleh anak kandung dapat pula diperoleh anak angkat, karena kedudukan mereka dinyatakan sama.¹⁴³

Dalam Alquran dijelaskan pengaturan nasab dalam hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam Alquran dilihat pada QS. *al-Ahzab* ayat 4 dan 5 tentang hukum zihar dan kedudukan anak.¹⁴⁴

- 2) Ketentuan dalam Hadis

Mukhsin Asyrof mengutip dari sabda Nabi Muhammad saw. tentang nasab seorang anak yakni anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu. Mukhsin Asyrof juga mengutip dari hadis Nabi Muhammad saw. mengenai masalah nasab diriwayatkan dan dia bersabda “barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya, sedangkan dia mengetahui, maka surga haram baginya.”

- 3) Menurut Fikih Islam

Asal usul anak dalam hukum Islam dapat diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Dengan cara *al-firasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
- b. Dengan cara *iqrar* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

¹⁴³Pagar, Kedudukan, h. 14.

¹⁴⁴ Studi Pendalaman al-Qur’ân Surat Al -Baqarah-An Nas, (Jakarta: Rajagrafindo, cet 2), Asbābun Nuzūl berkenaan dengan seorang quraaisy dari Bani Jamhin yang bersama Jamillain Ma’mar mengaku berhati dua yang lebih cemerlang daripada hati Muhammad (HR. Ibnu Abi Hatim dari Suddi).

- c. Dengan cara *bayyinah* yaitu membuktikan pengakuan berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang betul anak si pulan. Termasuk juga anak yang lahir wathi'syuhbat dan anak yang lahir dari nikah fasid. Dalam Hukum Islam anak dibagi dua yakni anak yang diketahui hubungan darah dengan bapaknya, dan anak yang tidak diketahui hubungan darah dengan bapaknya, ia hanya mempunyai hubungan dengan ibunya yang melahirkan.¹⁴⁵

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud dari salah satu pembaharuan tentang status anak angkat, dengan pemberian wasiat wajibah.

Pada masa awal-awal Islam terjadi peperangan dan bencana, banyak orang tua yang meninggal dan anak-anak menjadi yatim piatu. Islam memberikan jalan keluar dengan melakukan pengangkatan anak, dengan cara menikahkan para janda dengan laki-laki lain, sehingga anak-anak tersebut tidak lagi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat melainkan anak tiri.

Islam mengakui dan mengajurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan dan pengasuhan agar seorang anak tidak sampai terlantar. Sehingga status anak angkat tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung. Hukum Islam telah menggariskan hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebagai hubungan orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas yang sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab.

Wahbah Al-Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari Suriah) menyatakan agama merupakan keadilan dan menegakkan kebenaran. Salah satunya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran untuk menghubungkan anak kepada ayah kandung.¹⁴⁶ Islam tidak memperbolehkan pengangkatan anak lain agama, jika Islam membolehkan pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang yang berbeda agama untuk melakukan pengangkatan anak dan mempunyai akibat hukum seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu bukan beragama Islam.

¹⁴⁵ <http://AnakAsuhdanAnakAngkatdanKeluargaMuslimbolgs.htm>, (Oktober, 2011).

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fatwa*, (Kairo : Dār al-Syuruq, 1991), h. 321.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung tanpa adanya kekuatan hukum antara kedua belah pihak hanya dengan surat perjanjian dan pelunasan biaya-biaya yang diinginkan orang tua kandung. Dan orang tua angkat berhak meletakkan namanya dibelakang nama anak dalam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Untuk mengetahui nasab seorang anak dapat diketahui melalui tiga cara adalah sebagai berikut :

- a. Melalui nikah *sahih* atau *fasid*, dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya, sekalipun pernikahan dan kelahiran anak tidak didaftarkan secara resmi pada instansi terkait.
- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. Pengakuan anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti saudara, paman atau kakek. Dalam pengertian jika seseorang laki-laki mengakui bahwa seseorang anak kecil adalah anaknya, atau sebaliknya seorang anak kecil yang telah baligh mengakui seorang laki-laki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak dinasabkan kepada laki-laki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Anak tidak jelas nasabnya, tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan ini batal karena Rasulullah saw. mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya.
 2. Pengakuan tersebut rasional, maksudnya seseorang yang mengakui sebagai ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya. Jika seseorang mengakui keturunan seorang anak tetapi kemudian datang laki-laki yang mengakui anak tersebut adalah keturunannya. Dalam hal ini hakim perlu meneliti lebih jauh tentang siapa yang berhak terhadap anak tersebut.
 3. Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal si anak berhak mengetahui nasabnya

4. Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.¹⁴⁷
- c. Melalui alat bukti, bahwa saksi harus benar-benar mengetahui keadaan dan sejarah anak yang dinasabkan. Hal ini sejalan dengan Sabda Rasulullah saw. ketika itu mengatakan:”Apakah engkau melihat matahari?” Lelaki itu menjawab:”Benar saya lihat”. Kemudian Rasulullah saw. bersabda:”Apabila sejelas matahari itu, maka silahkan kemukakan kesaksianmu. Tetapi apabila tidak (demikian), maka jangan menjadi saksi”(HR. al-Baihaqi dan al-Hakîm).¹⁴⁸

B.Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Anak angkat menurut hukum adat adalah masuknya anak angkat kedalam keluarga orang tua angkat dan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Pengangkatan anak dalam hukum adat Indonesia harus dilakukan secara terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta bantuan kepala adat.

Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat pendukungnya. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Jika hukum adat yang mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat setempat maka masyarakatnya sendiri yang akan merubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka.

Hukum Adat mempunyai corak yaitu :

1. Hukum adat mengandung sifat tradisionil, bahwa peraturan hukum adat umumnya oleh rakyat dianggap berasal dari nenek moyang yang legendaris (hanya ditemui dari cerita orang tua)

¹⁴⁷ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 186.

¹⁴⁸ *Ibid*,

2. Hukum adat dapat berubah, perubahan dilakukan bukan dengan menghapuskan dan mengganti peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan tersebut akan bertentangan dengan sifat adat istiadat. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan oleh pemangku adat (terutama oleh kepala-kepala adat), peristiwa-peristiwa yang ada sering dengan tidak diketahui berakibat perubahan peraturan adat. Terkadang masyarakat masih menyangka bahwa peraturan-peraturan lama tetap berlaku bagi keadaan-keadaan baru.

3. Kesanggupan hukum adat menyesuaikan diri, karena hukum adat terdapat sifat hukum tidak tertulis dan tidak dikodifikasi maka hukum adat. Masyarakat modern ada yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi tetapi ada juga sebagian yang masih menerapkan tradisi-tradisi tersebut.

Mustofa Sy dalam bukunya mengutip F.D. Holleman ada 4 (empat) sifat umum hukum adat Indonesia yang dipandang sebagai kesatuan, yaitu religius, komun, kontan, dan konkret. Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Mustofa Sy dalam bukunya mengutip Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai. Yang dimaksud dengan terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai merupakan perbuatan itu akan selesai ketika itu juga tidak mungkin ditarik kembali.¹⁴⁹

Hukum adat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun temurun. Hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap masyarakat setempat. Hukum adat sangatlah dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya. Hukum adat juga mengatur tentang pengangkatan anak. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat setempat namun masih perlunya pengesahan dengan suatu penetapan pengadilan

¹⁴⁹Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h.50.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan yang mempunyai tiga sistem adalah sebagai berikut:

1. Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan. Contoh beberapa daerah dalam pengangkatan anak menganut sistem patrilineal adalah sebagai berikut :

a) Adat Batak (Tapanuli Utara) apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka ia dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang disebut “*anak naniain*”. Anak *naniain* baru sah jika memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut: yang mau meng-*ain* anak tidak mempunyai anak laki-laki, Anak yang diangkat tersebut harus dari antara saudara anak-anaknya atau keluarga dekat lainnya, harus *dirajahon*, artinya harus diadakan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu dan dihadiri oleh keluarga dekat/dalihannatolu serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja-raja blus).¹⁵⁰

Adanya perbedaan antara anak angkat dan anak *naniain*, apabila terjadi pengangkatan tanpa memenuhi syarat-syarat seperti mengambil anak *naniaian*, pengangkatan anak tersebut tidak diakui. Anak *naniain* menjadi ahli waris dari seorang ayah yang meng-*ain*-nya dan kehilangan hak ahli warisnya dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.¹⁵¹

Pengangkatan anak secara umum yang bersifat non formal yang tidak mempunyai akibat hukum, contoh di daerah Tapanuli Utara dikenal juga dengan memberi marga tertentu untuk si istri atau suami melalui suatu upacara adat yang harus dihadiri keluarga dekat/*dalihon natolu* dan pengetua-pengetua dari sekeliling kampung. Namun hal ini hanya terbatas bagi mereka yang

¹⁵⁰ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h. 70.

¹⁵¹ *Ibid*,

mengakuinya dan tidak dapat dipaksakan agar orang-orang lain mau mengakuinya.¹⁵²

b)Adat Batak Karo

Hukum adat Batak Karo seorang anak angkat laki-laki sepenuhnya mempunyai kedudukan dan hak mewarisi atas harta benda peninggalan orang tua angkatnya. Namun agar seorang anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat adat sebagai anak angkat, maka haruslah melalui tata cara dan ketentuan peradatan dengan adanya perpindahan hukum status anak dan pengukuhanannya dalam keluarga baru yang mengangkatnya. Adapun tata cara dan ketentuan peradatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1.Upacara pengangkatan harus dilakukan dalam suatu *Runggu Adat sangkep si telu* (di hadapan anak *beru*, *senina*, dan *kalimbumbu*) dan pengangkatan harus mendapat persetujuan dari mereka. Dalam adat keturunan anak laki-laki dan anak perempuan sangat diharapkan keluarga karena anak laki-laki diharapkan menyambung tali kekeluargaan dengan Kalimbubu, setelah besar diharapkan anak itu kelak dapat mengawini putri Kalimbubu (pamannya). Sementara anak perempuan diharapkan dapat meneruskan tali kekeluargaan dengan anak Beru, kelak nantinya dapat melangsungkan perkawinan dengan putra dari anak Beru. Dengan melangsungkan perkawinan maka strata sosial sembuyak, anak beru, Kalimbubu (*tribal collibium*) pada masyarakat suku Karo tetap terpelihara. Hukum Adat melihat prinsip-prinsip hukum Islam yang dikembangkan sebagai hukum, jika ada praktik adat yang menyimpang akan diluruskan secara bertahap melalui pembentukan Hukum yang Islami.¹⁵³

2.Dalam upacara adat, pengangkatan harus ada jamuan makan yang disebut *perkahkah bohan*, yaitu suatu pesta jamuan makan yang lauk-pauknya terdiri atas sayur-sayuran bercampur daging yang dimasak dalam bambu

¹⁵² *Ibid*,

¹⁵³ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2008), h. 46.

muda (*bohan*=bambu muda bekas tempat memasak). Selesai upacara jamuan makan, dua buah bambu muda bekas tempat masakan tadi dipukulkan keras-keras agar bunyinya yang nyaring didengar khalayak ramai atau para hadirin dalam perjamuan makan tersebut.

3. Pemukulan bambu tersebut disebut dengan "*perkahkah bohan*" atau diumumkannya tentang adanya pengangkatan anak. Dan yang mengkahkah-kan bohan itu harus anak beru, pada saat itu diumumkanlah pengangkatan dan resmilah anak tadi menjadi anak si pengangkat dengan jalan memberi marga ayah angkat kepada si anak.
4. Setelah pengumuman pemberian marga yang diikuti pengakuan *bebere* (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat, dengan serentak pula pihak kalimbumbu menyerahkan kain perembah (semacam kain selendang) sebagai simbolik penggendong anak yang diresmikan. Kemudian pula puang kalimbumbu menyerahkan kain *ndawa* (semacam kain ulos selimut) sebagai simbolik perlindungan kepada anak).
5. Kepada pihak anak beru diberikan sekadar uang atau barang oleh pihak pengangkat anak sebagai permintaan agar anak beru memperlakukan atau menjaga anak tadi supaya tumbuh menjadi sehat dan besar. Demikian juga kepada kepala kampung diberikan sejumlah uang oleh ayah angkat sebagai pemberitahuan bahwa anak itu adalah anggota keluarga yang sah dari ayah angkat.¹⁵⁴

Setelah selesai upacara adat maka anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tua dan dengan sendirinya ia menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, putus hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua kandung dan tidak mempunyai kedudukan hukum lagi sebagai ahli waris terhadap pusakan orang tua kandung. Anak yang diangkat mempunyai batas umur yaitu *opedenga i tandaina nande bapana* artinya

¹⁵⁴*Ibid*, h. 72.

anak itu belum lagi mengenal siapa ibu bapaknya, usia anak tersebut dalam batas-batas usia bayi yang berumur sampai dua tahun.¹⁵⁵

Yang sah untuk melakukan pengangkatan anak ini hanyalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Hukum adat karo tidak mengenal pengangkatan anak oleh seseorang yang belum kawin dan pengangkatan harus dilakukan oleh suami istri. Orang yang sudah kawin, tetapi sedang dalam perceraian tidak sah melakukan pengangkatan anak.¹⁵⁶

2. Sistem Matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ini, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.

Sistem kekerabatan matrilineal masih tetap dianut masyarakat Minangkabau. Susunan kekeluargaan Minangkabau mengalami perubahan dikenal dengan sistem keluarga kecil yang mirip keluarga batih (*nuclear family*). Merupakan keluarga terkecil "*semende*" yang terdiri atas ibu dan anak-anaknya tidak lagi secara mutlak dipimpin oleh mamak rumah (saudara kandung laki-laki dari ibu, syarat utama menjadi mamak, yaitu yang tertua, baik umur maupun derajat dalam kaum dan *jurai* yang bersangkutan), tetapi telah banyak yang dipimpin oleh ayah atau ibu.¹⁵⁷

Dalam hukum adat di Minang Kabau tidak mengenal pengangkatan anak, yang dikenal hanya dengan sebutan pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh seperti anak sendiri. Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang tua yang memelihara. Sedangkan hubungan antara anak dan orang tua kandung tidak terputus. Dalam hal ini pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat namun perbuatan tersebut tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.¹⁵⁸

¹⁵⁵Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h.70.

¹⁵⁶*Ibid*

¹⁵⁷*Ibid*, h. 76.dilihat h.66

¹⁵⁸Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 62.

3. Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.¹⁵⁹

Contoh beberapa daerah dalam pengangkatan anak yang menganut sistem parental atau bilateral adalah sebagai berikut:

1. Adat Jawa dapat diketahui pengangkatan anak angkat adalah anak *pupon*. Pengangkatan anak biasanya pihak yang akan mengangkat anak mengadakan musyawarah dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat/selamatan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga. Umur anak yang diangkat tidak ditentukan namun sebaiknya masih bayi. Disamping dikenal anak angkat (*pupon*), dikenal juga kebiasaan seseorang yang sudah mempunyai anak kandung mengangkat anak yang disebut anak pungut. Anak *pupon* dan anak *pungut* itu sama saja dengan anak angkat, yang berbeda hanyalah sebutannya saja.
2. Sulawesi Tengah

Anak angkat disebut dengan *lai poana*. Namun dalam pengangkatan tersebut tidak ada upacara khusus untuk mengangkat anak. Pada umumnya mereka diangkat anak oleh famili atau orang luar berdasarkan hubungan batin di antara yang mengangkat anak dan yang diangkat anak. Tidak ada batas umur anak angkat dan tidak ada batas berapa banyak anak yang diangkat.¹⁶⁰

3. Di Jawa Timur terdapat suatu lembaga yang menyatakan pengangkatan anak itu suatu perbuatan tunai, yaitu dengan pembayaran mata uang (*magis*) sejumlah *rong wang segobang* (17 ½ sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana *magis* untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya (*pedot*).¹⁶¹

¹⁵⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.23.

¹⁶⁰Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h. 78.

¹⁶¹Prawirohamidjojo, *Pluralisme*, h. 109.

Pada umumnya pengangkatan anak dilaksanakan menurut adat kebiasaan suatu daerah dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang masih dianut oleh komunitas adat tersebut.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh adat setempat
- 3) Pengangkatan anak menurut hukum adat, tidak disahkan ke Pengadilan Negeri namun dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Instansi Catatan Sipil Kabupaten/kota.
- 4) Pengangkatan anak tersebut juga dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan.¹⁶²

Hukum Adat dan Hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat seperti dalam pepatah di daerah Minangkabau adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai (hukum adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri).¹⁶³ Peraturan Pemerintah juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang tata acara sahnya pengangkatan anak yang harus dilakukan secara formal.

Di beberapa daerah hukum adatnya telah mendapatkan pengaruh syariat Islam yang kuat, dalam pengangkatan anak membawa akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam seperti masyarakat Melayu juga mengenal anak-anak seperti :

1. Anak angkat pulang buntal artinya anak tersebut seluruhnya ditanggung oleh ayah angkatnya termasuk biaya hidup sekolah dan sampai dia kawin
2. Anak angkat pulang nama, dimana hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya ngan tetap ada dan juga tetap bertanggung jawab kepada orang tua kandungnya

¹⁶² *Ibid*, h. 116.

¹⁶³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, cet.3,1993), h. 201.

3. Anak angkat ulang serasi adalah anak angkat tersebut dipulangkan oleh orang tua kandungnya kepada ayah angkatnya karena anak tersebut kalau bersama orang tua kandungnya sering sakit-sakitan, sedangkan pada orang tua angkatnya dia sehat-sehat, maka anak itu dipulangkan kembali oleh orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.

Biasanya dalam pengangkatan anak ini diadakan upacara pengangkatan dengan kenduri di rumah orang tua angkat dan dengan tata cara persyaran adat tertentu yang dihadiri oleh para keluarga dan pengetua-pengetua adat serta penguasa setempat. Beberapa macam nama anak angkat tersebut di atas mengenai hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak putus sama sekali.¹⁶⁴

Beberapa faktor problem dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. faktor yuridis yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari adopsi itu sendiri
- b. faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri
- c. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.¹⁶⁵

Pengangkatan terkadang dilakukan secara tertulis maupun ada yang tidak tertulis, asalkan pengangkatan yang dilakukan ini dinyatakan di depan umum.¹⁶⁶

Pengangkatan dapat memberikan kesejahteraan anak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang berbunyi “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.¹⁶⁷

¹⁶⁴Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h. 80.

¹⁶⁵Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 22.

¹⁶⁶Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 30..

¹⁶⁷Undang-undang RI No.4 Tahun 1979

Kedudukan dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum adat berbeda tiap daerah, di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki. Akibat-akibat dilakukan adopsi yaitu:

1. Anak yang diadopsi memperoleh kedudukan sebagai anak sah dari orang tua *adoptif*
2. Karena adopsi tersebut, maka putuslah hubungan kekeluargaan yang telah ada antara anak tersebut dengan sanak keluarga sedarah dan semendanya.¹⁶⁸ Perbuatan hukum tersebut melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tua kandung dengan memasukkan anak angkat ke dalam keluarga pihak bapak, sehingga anak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya.¹⁶⁹

C.Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Secara *etimologi* adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dari bahasa Belanda atau “*adopt*” (*adoption*).¹⁷⁰ Dari segi yuridis anak yang diangkat putusnya hubungan anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, dan anak tersebut dianggap sebagai anak kandung dari orang tua yang mengadopsi. Pengangkatan anak disebut dengan adopsi.

Hukum Barat (*BW*) hanya mengatur dua pengertian anak yakni anak sah dalam perkawinan dan anak di luar perkawinan. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tua kandung dan bapaknya telah meninggal serta si ibu menikah lagi, haruslah adanya persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.

Namun jika anak angkat tersebut merupakan anak di luar perkawinan diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui ia sebagai anaknya. Anak angkat haruslah tercatat di akte Notaris, menurut pasal 10 *Staatsbald* No 129 Tahun 1917 kemudian ditambahkan pencatatannya pada akte kelahiran anak.

¹⁶⁸Prawirohamidjojo, *Pluralisme*, h. 115.

¹⁶⁹R.Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1967), h. 118.

¹⁷⁰Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 4.

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak dalam pasal 5 *Staatsblad* sebagai berikut:

1. Apabila seorang laki-laki, beristri atau telah pernah beristri, tak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran, maupun keturunan karena pengangkatan, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.
2. Pengangkatan yang demikian harus dilakukan oleh si orang laki tersebut bersama-sama dengan istrinya, atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan, oleh dia sendiri.
3. Apabila kepada seorang perempuan janda, yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya yang telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaksud dalam ayat kesatu pasal ini, maka boleh pun ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan anak itu pun tak boleh dilakukannya.¹⁷¹

Menurut ketentuan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 perbuatan pengangkatan anak mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Anak angkat sebagai anak memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak.¹⁷²
- 2) Anak angkat yang dijadikan sebagai anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat.
- 3) Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat
- 4) Pengangkatan anak terputus segala hubungan Perdata yang berujung pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Penjelasan diatas mempunyai pengertian anak angkat sebagai anak kandung sendiri dari orang dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari

¹⁷¹Mustofa Sy, *Pengangkatan*, h. 11.

¹⁷²Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 33.

perkawinan orang tua angkat, dan dapat memakai nama orang tua angkat dibelakang nama anak angkat.

Akibat hukum pengangkatan anak adanya perbedaan penentuan nasab menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Staatsblad* 1917 No 129 adalah menurut Kompilasi Hukum Islam nasab si anak tidak terputus dengan nasab orang tua kandungnya, anak yang diangkat tetap dipanggil bin/binti dengan nama ayah (orang tua kandung), jika si anak perempuan dan menikah orang tua angkat tidak menjadi wali nikah anak angkat. Jika anak angkat telah dewasa ia dapat dinikahi oleh orang tua angkat jika keduanya saling menyukai.

Sedangkan pada *Staatsblad* nasab anak angkat terputus dengan nasab orang kandung, anak angkat tersebut dipanggil bin/binti dengan nama ayah (orang tua angkat), dan orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya, jika anak yang diangkat perempuan orang tua angkat dapat menjadi wali nikah. Jika anak angkat tersebut sudah dewasa, orang tua angkat tidak dapat menikahnya. Pengangkatan anak yang dilakukan haruslah berkekuatan hukum, karena pengangkatan anak mereka dinyatakan di atas segel yang kokoh yakni berupa akte pengangkatan anak. Selama akte tersebut masih baik, maka anak tersebut masih kokoh dalam kedudukan sebagai anak angkat. Namun ada pula pengangkatan anak tanpa segel, tapi hal ini banyak menyebabkan anak tersebut kembali kepada orang tuanya yang sah.¹⁷³

BAB IV

¹⁷³ Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 33

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 54
TAHUN 2007 DI PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, masyarakat Islam mulai mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, namun masih ada masyarakat Islam yang mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri dengan alasan tertentu.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun undang-undang tersebut tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, sehingga bagi pemohon yang beragama Islam ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Adanya kewenangan absolut yang sama-sama dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan pengangkatan anak, dapat mengakibatkan persinggungan kewenangan antara kedua lembaga peradilan tersebut. Mungkin saja terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menyatakan sama-sama berwenang untuk mengadili, dan bisa pula kedua lembaga peradilan tersebut menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Aturan teknis prosedural pengangkatan anak adalah berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam SEMA RI No 2 tahun 1979 yang kemudian dirubah dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak kemudian disempurnakan lagi dengan SEMA No. 4 tahun 1989. Dengan keluarnya PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan SEMA No. 6 tahun 1983 jo PP No. 54 tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial RI Nomor

110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang semuanya bersifat saling melengkapi.¹⁷⁴

Anak yang diangkat oleh calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.¹⁷⁵

Untuk melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi mampu ekonomi dan sosial

¹⁷⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1951-2007, *Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007*, 2007.

¹⁷⁵Pagar, *Himpunan*, h.422.

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 enam (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan
- m. Memperoleh izin Menterti dan/atau kepala instansi sosial.¹⁷⁶

Adapun penetapan pengangkatan anak mempunyai syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Foto copy kutipan akta nikah atas nama pemohon (calon orang tua angkat) yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Kotamadya, nama Kota, tanggal, yang telah *dinazegeling* dan dilegarisir oleh panitera pengadilan agama setempat dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata benar.
2. Foto copy kutipan akta nikah orang tua kandung anak angkat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Kotamadya, nama Kota, tanggal, yang telah *dinazegeling* dan dilegalisir oleh panitera pengadilan agama setempat dan dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata benar.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan setempat, tanggal dikeluarkan ktp masih berlaku, yang telah *dinazegeling* dan dilegalisir oleh panitera agama setempat dan telah disesuaikan dengan surat asli ternyata benar.
4. Foto copy kartu penduduk orang tua kandung yang dikeluarkan oleh camat kecamatan setempat, tanggal dikeluarkan ktp masih berlaku, yang telah *dinazegeling* dan dilegalisir oleh panitera agama setempat dan telah dicocokkan dengan surat asli ternyata benar.
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung dan orang tua angkat yang dikeluarkan oleh camat setempat yang telah *dinazegeling* dan

¹⁷⁶Pagar, *Himpunan*, h. 423

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama dan disesuaikan dengan yang asli.¹⁷⁷

6. Foto copy Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit setempat, yang telah *dinazegeling* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan setempat dan telah disesuaikan dengan surat aslinya
7. Jika calon anak angkat berada dalam asuhan yayasan sosial harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari orang tua kandung terhadap pemohon I dan pemohon II yang telah *dinazegeling* dan dilegalisir oleh Panitia Pengadilan Agama setempat dan disesuaikan dengan surat aslinya. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak ada dua macam. Hal ini disebutkan pada pasal 7 yang berbunyi “Pengangkatan anak terdiri dari :
 1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, dan
 2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”
9. Jika orang tua kandung anak tersebut telah meninggal harus adanya foto copy surat kematian orang tua kandung si anak
10. Jika salah satu orang tua angkat telah meninggal maka harus disertai foto copy surat kematian orang tua angkat.
11. Surat keterangan catatan dari kepolisian, apakah orang tua angkat maupun orang tua kandung mempunyai riwayat berkelakuan kurang baik.¹⁷⁸
12. Surat keterangan dokter tentang pemohon yang menyatakan sehat jasmani dan rohani yang telah dibubuhi materai.
13. Surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari suami pemohon yang telah dibubuhi materai.
14. Surat pernyataan pemohon tentang tujuan pengangkatan anak yang telah dibubuhi materai.

¹⁷⁷ Sumber Penetapan perkara dari tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan.

¹⁷⁸ *Ibid*,

15. Surat pernyataan penyerahan dari orang tua anak kepada orang tua angkat yang telah dibubuhi materai.
16. Foto copy daftar perincian gaji atas nama pemohon yang dikeluarkan Instansi tempat bekerja, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan diketahui oleh perusahaan, dicocokkan dengan ke asliannya dan telah dibubuhi materai.¹⁷⁹

Adanya saksi yang mengetahui persidangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti:

1. Orang tua kandung anak tersebut
2. Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya. Saksi tersebut dapat diajukan tetangga calon orang tua angkat, saksi dapat juga dari keluarga sendiri menyatakan bahwa benar ia sudah menikah 15 tahun dan belum mempunyai keturunan.
3. Saksi mengatakan bahwa pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut, dari segi ekonomi pemohon mampu.
4. Saksi menyerahkan berkas identitas diri yang lengkap dan dicocokkan dengan yang asli dan telah dibubuhi materai secukupnya.
5. Pengangkatan anak tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan.
6. Calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkat

Perkara yang penulis paparkan dari tahun 2008 sampai dengan 2010 di Pengadilan Agama Medan adalah sebagai berikut:

| NO | KETERANGAN PENETAPAN | PP NO. 54 TAHUN 2007 | |
|----|---------------------------------|--|--------------|
| | | SESUAI | TIDAK SESUAI |
| 1. | Nomor:143/Pdt.P/2008/P A-Mdn | Pemohon berumur 37 tahun. Status perkawinan 12 tahun. Orang tua angkat mempunyai pekerjaan pengawai swasta. Adanya saksi dari bidan pada rumah sakit. Ayah angkat dan anak angkat | |

¹⁷⁹Sumber Penetapan Perkara dari tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan.

| | | | |
|---|--------------------------|--|---|
| | | beragama Islam. Pengangkatan ini sesuai dengan KHI | |
| 2 | No.128/Pdt.P/2008/PA Mdn | Usia calon ayah angkat masih dibawah umur 55 tahun, ayah angkat dan anak angkat sama-sama beragama Islam. Status menikah 7 tahun. Adanya saksi yang dikenal pemohon I dan II. Perekonomian yang cukup baik. | Pada akte kelahiran nama anak angkat memakai nama orang tua angkat. |
| 3 | No.100/Pdt.P/2009/PA Mdn | Ayah angkat berumur 45 tahun. Pemohon dan anak angkat beragama Islam. Berstatus menikah sudah 14 tahun. Perekonomian pemohon mampu. Adanya surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dari suami pemohon. Surat keterangan pemohon. Surat keterangan slip gaji, Surat keterangan catatan kepolisian. Adanya saksi-saksi yang benar-benar diketahui oleh pemohon. Anak angkat telah diasuh sejak ia lahir. Orang tua angkat dan anak angkat beragama Islam. Pengangkatan ini sesuai dengan KHI | |
| 4 | No. 21/Pdt.P/2010/PA.Mdn | Pemohon berumur 49 tahun, pemohon dan anak angkat beragama Islam, pekerjaan orang tua angkat PNS. Pemohon mengajukan bukti-bukti dan telah diperiksa kebenarannya oleh Pengadilan Agama. Anak yang diangkat adalah keponakan. sendiri. | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| | | Orang tua angkat dan angkat sama-sama bergama Islam. Pengangkatan ini sesuai dengan KHI | |
| 5 | No. 36/Pdt.P/2010/PA.Mdn | Pemohon berumur 40 tahun, Pemohon telah bercerai (janda), PNS, beragama Islam. Pemohon melampirkan surat keterangan telah bercerai dari pengadilan setempat. Pengangkatan ini sesuai dengan KHI. | |

Dari 5 perkara tersebut penulis tidak menemukan adanya pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Oleh karena itu pembahasan terbatas pada penerapan Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 sampai 2010 melakukan pengangkatan anak sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2007, namun pada tahun 2008 masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh orang tua angkat bahwasannya akte kelahiran tercantum nama ayah angkat.

Sebagian besar dari perkara yang penulis jadikan bahan penelitian, ternyata calon anak angkat sudah ada dalam asuhan calon orang tua angkat sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama Kota Medan. Anak diserahkan dengan sukarela oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat. Bahkan pada beberapa kasus telah dibuat surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Dan dari keterangan para saksi, selama dalam pengasuhan orang tua angkatnya, calon anak angkat telah dirawat dan dipelihara dengan baik, dipenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dan diberi kasih sayang seperti layaknya terhadap anak kandung. Atas dasar untuk mendapatkan status yang sah di mata hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota Medan. Peraturan

Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur hal tersebut di atas dalam pasal 8, pasal 9.¹⁸⁰

Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai alasan dengan melihat latar belakang calon orang tua angkat dan orang tua kandung calon anak angkat. Baik dari ekonomi, sosial dan bahkan agamanya. Karena tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak tersebut. Dari segi ekonomi bahwa orang tua angkat harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya. Dari segi sosial bahwa keluarga orang tua angkat adalah keluarga yang harmonis sehingga si anak terpenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dari orang tua. Dan dari segi agama bahwa orang tua angkat dan anak angkat harus seagama agar tercipta suasana spiritual yang baik dalam keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini sesuai dengan Hukum Islam dimana sumber pengangkatan anak yang dilarang dan yang dianjurkan oleh Islam¹⁸¹

Beberapa alasan yang penulis temukan pada perkara di Pengadilan Agama Kota Medan sejak tahun 2008 sampai 2010 terlihat pada tabel berikut.

¹⁸⁰ Pagar, *Himpunan*, h. 422.

Pasal 8 :Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, meliputi :Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan b.Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 :1Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.2.Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

¹⁸¹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 1-43.

Dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 4 dan 5, 2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 37. 3. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 40. 4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak firman Allah QS. al-Ma'idah ayat 32. 5. Mengangkat anak bagian dari bertolong-tolongan dalam hal kebajikan firman Allah QS. al-Ma'idah ayat 2. 6. Anjuran memberi makan kepada anak-anak terlantar dan anak yatim firman Allah QS. al-Insan ayat 8. 7. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 5. 8. Dalam hal warisan kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat firman Allah QS. al-Anfal ayat 75. 9. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya. 10. Haram membenci ayahnya sendiri. 11. Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga. 12. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil. 13. Allah swt. melarang terhadap panggilan Zaid bin Muhammad oleh masyarakat saat itu. 14. Konsepsi pengangkatan anak versi Tionghoa adalah haram. 15. Konsepsi pengangkatan anak ada dua yaitu yang diharamkan dan yang dianjurkan.

Tabel 2.
Alasan Pengangkatan Anak
di Pengadilan Agama Medan Tahun 2008 – 2010

| NO | ALASAN | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 1 | Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh keturunan/anak | 3 |
| 2 | Tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan | 1 |
| 3 | Membantu saudara (yatimpiatu atau kondisi ekonomi keluarga kurang | 1 |

Sumber perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan tahun 2008 s/d 2010.

Pada tabel 2 menerangkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan belum mempunyai keturunan, belum mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, dimana anak yang diangkat masih mempunyai hubungan antara pemohon I dan pemohon II yang merupakan adik kandung, kakak kandung maupun abang kandung, paman dan makcik. Selain itu, ada juga anak yang berasal dari keluarga yang bersaudara dalam jumlah banyak sementara orang tua tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak sanggup untuk membiayainya sekolahnya. Bahkan ada juga anak yang tidak diketahui ayah biologisnya sehingga si ibu malu jika harus membesarkan anak tanpa ayahnya dan si ibu merasa tidak mampu jika harus membesarkan anaknya sendiri.¹⁸²

Namun apapun alasannya, pengangkatan anak dilakukan adalah untuk kepentingan si anak dan untuk masa depannya. Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 2 pun menegaskan bahwa: "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan."

Status dari calon orang tua angkat dapat mempengaruhi alasan pengangkatan anak dilakukan. Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pasangan suami istri ataupun orang tua tunggal. Yang dimaksud dengan orang tua tunggal adalah orang yang berstatus tidak menikah atau duda/janda dan belum pernah

¹⁸² Sumber dari perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama tahun 2008 s/d 2010.

menikah. Untuk orang tua tunggal harus terlebih dulu mendapat izin dari Menteri yang didelegasikan kepada Kepala Instansi Sosial di Propinsi.

Pada tabel 2 di atas jelas terlihat bahwa pengangkatan anak lebih banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari lima tahun tanpa dikaruniai anak yaitu sebanyak 3 perkara, dan 1 perkara ingin menambah anak laki-laki atau anak perempuan. 1 perkara karena kekurangan ekonomi. Agar rumah tangga yang telah dibina dengan cinta dan kasih sayang dapat tetap dipertahankan, pasangan suami istri menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarga. Sehingga kesepian rumah tangga dapat dihindari digantikan dengan kebahagiaan karena hadirnya seorang anak yang butuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua angkat.

Pasangan yang sudah mempunyai anak memerlukan kehadiran seorang anak lagi. Hal ini untuk melengkapi kebahagiaan keluarga yang sudah ada sebelumnya, seperti menambah jumlah anak, belum mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, dan mengharapkan anak yang bisa menemani di hari tua karena anak-anak kandungnya sudah dewasa.

Urutan berikutnya adalah status orang tua angkat tunggal yaitu janda yang mengangkat anak. Kondisi mereka adalah tidak memiliki pasangan hidup dan tidak mempunyai anak. Otomatis mereka tidak memiliki orang yang dapat saling berbagi perhatian dan kasih sayang dengannya. Dengan mengangkat anak, mereka jadi punya tempat untuk berbagi dan mencurahkan kasih sayang.

Pada tabel terlihat ada 1 perkara pengangkatan yang dilakukan oleh orang tua tunggal yang pernah menikah dan telah bercerai. Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kasih sayang dan perhatiannya kepada si anak. Secara psikologi hal ini dapat menimbulkan keseimbangan dalam hidupnya, karena sudah menjadi kodratnya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan harus berbagi dengan sesama. Mengenai

pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengaturnya dalam Pasal 16.¹⁸³

Dalam perkara yang menjadi bahan penelitian penulis, sebagai orang tua tunggal telah mendapat izin dari menteri. Menurut Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam pasal 12.¹⁸⁴

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, penulis telah mengumpulkan data dari perkara yang ada di Pengadilan agama Kota Medan sejak tahun 2008 sampai 2010 mengenai usia anak angkat di Pengadilan agama Medan tahun 2008 yang penulis tulis rata-rata pada usia dibawah 6 (enam) tahun. Disini terlihat bahwa anak usia di bawah 6 (enam) tahun masih menjadi prioritas dalam pengangkatan anak. Karena usia di bawah 6 (enam) tahun adalah usia dimana anak benar-benar butuh perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Hal ini lebih memungkinkan untuk terjalin hubungan lahir batin penuh kasih sayang seperti terhadap anak kandung. Selain itu agar anak dapat tumbuh sesuai dengan yang dikehendaki.

Dari hasil penelitian penulis tidak menemukan adanya alasan mendesak, seperti korban bencana atau anak pengungsi dalam melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan. Juga tidak ditemukan anak dalam perlindungan khusus. Yang dimaksud anak dalam perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran dll.

¹⁸³Pagar, *Hukum*, h. 422 .

Pasal 16 berbunyi: 1.Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri. 2.Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi Sosial di Propinsi.

¹⁸⁴*Ibid*,

Pasal 12 berbunyi: (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus. (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Tabel 3
Status anak yang diangkat di Pengadilan Agama Medan
Tahun 2008-2010

| NO | STATUS | JUMLAH |
|----|---|--------|
| 1 | Anak masih punya orang tua (ayah dan ibu) | 3 |
| 2 | Anak yang tidak diketahui ayah biologisnya | 1 |
| 3 | Anak yatim piatu (tidak punya ayah dan ibu) | 1 |

Dari tabel di atas, anak yang masih memiliki orang tua adalah yang paling banyak dijadikan sebagai anak angkat yaitu sebanyak 3 perkara. Kedua orang tua kandung menyerahkan dengan sukarela kepada calon orang tua angkat, demi kebaikan dan masa depan si anak. Ada anak yang tidak diketahui siapa ayah biologisnya dijadikan sebagai anak angkat 1 perkara sehingga si anak mendapatkan status anak yang mempunyai orang tua yang lengkap. Dengan menjadi anak angkat, si anak mendapatkan perawatan dan perhatian yang lebih baik dari seorang ibu dan ayah. Selain itu juga ditemukan 1 perkara dimana anak yatim piatu dijadikan sebagai anak angkat, sehingga si anak memiliki orang tua yang dapat merawat, melindungi, memelihara dan memperhatikannya seperti orang tua kandungnya sendiri. Secara psikologis, dengan mempunyai orang tua angkat, si anak seperti mendapatkan orang tua lagi sehingga akan mengurangi kesedihan atas kehilangan orang tua kandungnya.

Tabel 4

Subjek yang diangkat sebagai anak angkat di Pengadilan Agama Medan tahun
2008-2010

| NO | SUBYEK | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | Kemenakan sendiri | 4 |
| 2 | Anak orang lain/perorangan | 1 |
| 3 | Balai Kesejahteraan Sosial | - |

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih banyak kemenakan sendiri yang menjadi subyek pengangkatan anak yaitu sebanyak 4 perkara. Dengan pertimbangan lebih mengetahui keadaan jasmani dan rohaninya, sehingga tidak kesulitan untuk merawat dan memperhatikannya. Selain itu juga sudah tau asal usulnya yang masih merupakan darah dagingnya sendiri sehingga tidak sulit untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak angkat. Ada 1 perkara dimana anak orang lain yang diangkat menjadi anak. Meskipun begitu orang tua angkat kenal dengan orang tua kandung si anak sehingga dapat diketahui asal usul si anak. Hal ini penting terutama bagi anak perempuan ketika ia akan menikah. Sehingga, jika ayah kandungnya sudah tidak ada, dapat diketahui siapa yang menjadi pengganti ayah kandungnya. Disamping itu juga dapat diketahui siapa saja saudara kandungnya agar terjadi pernikahan antara saudara kandung. Selain di larang oleh agama, pernikahan yang terjadi antara saudara kandung dapat mengakibatkan cacat pada keturunannya.

Dengan mengetahui atau tidak menyembunyikan asal usul anak angkat berarti tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Seperti yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 4 yang menyatakan bahwa “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Mengenai waktu penyampaian kepada anak

angkat perihal orang tua kandungnya Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengaturnya pada pasal 6 yaitu :

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.¹⁸⁵

Perkara yang diteliti oleh penulis tidak ada anak angkat yang berasal dari Balai Kesejahteraan Sosial. Karena mengangkat kemenakan sendiri atau anak orang lain yang dikenali orang tua kandungnya lebih menjamin tidak terputusnya hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan anak yang dijadikan subyek dalam pengangkatan anak.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan untuk mengangkat 1 orang anak saja. Hal ini terlihat pada tabel 2 bahwa ada 5 perkara yang menetapkan pengangkatan 1 orang anak. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 21¹⁸⁶

A.Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Terhadap Status Anak Angkat.

Mengangkat seorang anak dengan berbagai alasan bisa mendasari seseorang dalam melakukan adopsi. Setelah melakukan pengangkatan anak yang telah disepakati dan disetujui antara kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa adopsi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dengan seorang anak dengan adanya kesepakatan dari orang tua atau keluarga si

¹⁸⁵Pagar, *Himpunan*, h. 421 .

¹⁸⁶*Ibid*,

Pasal 12 berbunyi yang menyatakan bahwa :1.Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. 2. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

anak yang akan diadopsi dan diangkat sebagai anak dan masuk kedalam keluarga *adoptan*.¹⁸⁷

Adopsi merupakan tindakan hukum yang penting sekali dan membawa akibat hukum yang luas sekali, sehingga perlu untuk mewajibkan bentuk dan tindakan hukum adopsi itu dicatat oleh notaris. Hal ini berkaitan dengan notaris agar mereka mengerti dan mengetahui terutama yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang hukum akan mendapatkan kejelasan, keterangan seperlunya sebelum menandatangani akta, dengan harapan agar para penghadap sadar akan tindakan hukum dari tindakannya dan untuk mencengah penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian dapat diharapkan berkurangnya sengketa mengenai masalah adopsi.¹⁸⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 sesuai dengan hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang secara tegas konsekuensi hukum berupa kebolehan ataupun larangan seperti berikut :

1. Larangan keras mempersamakan status anak angkat itu seperti anak kandungnya atau sebaliknya mempersamakan status orang tua angkat seperti orang tua kandung
2. Bahwa sebagaimana diatas anakmu bukanlah anak kandungmu/darah dagingmu, dia tetaplah orang lain yang dalam pemeliharaan kasih sayangmu sehingga ia tidak memiliki hubungan hukum apa pun menurut hukum Islam dengan orang tua angkatnya, tetapi ia hanya memiliki hubungan hukum keluarga dengan orang tua kandungnya. Dalam bidang hukum kewarisan anak angkat tidak waris-mewarisi dengan keluarga angkatnya
3. Kewajiban memanggil anak angkat menurut nama bapak kandungnya (bin/binti) bilamana masih jelas asal usulnya atau jika tidak diketahui siapa bapaknya, ia dipanggil sebagai saudara seagama dan maula-maula (maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, contohnya seperti Salim

¹⁸⁷J.Satrio, *Hukum*, h.222 .

¹⁸⁸*Ibid*, h.423.

anak angkat *ʾuṣaifāh* dipanggil maula *ʾuṣaifāh*. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam memberikan pengertian bahwa maulana artinya budak yang kami merdekakan. Istilah maula juga berlaku untuk tuan dilihat dari atas, dan juga berlaku untuk budak yang dimerdekakan jika dilihat dari bawah.

4. Kebolehan bapak angkat menikahi mantan istri anak angkat dilihat dari Zaid bin *ʾarīsāh*.¹⁸⁹.

Setelah melakukan pengangkatan anak, timbullah problem dalam pikiran orang tua angkat mengenai perlukah menyampaikan status adopsi ini?, apakah sebaiknya ditutup-tutupi saja agar si anak tudak mengetahui nya dan tetap menjadi anak kandung?, atau diberitahukan agar si anak mengetahui dengan sendirinya setelah ia dewasa. Disinilah timbul rasa kekhawatiran orang tua angkat nantinya setelah ia memberitahukan asal usul si anak (adopsi) dan ia pun ingin mengetahui siapa orang tua kandung yang sebenarnya, karena status adopsi bagi anak angkat adalah suatu yang penting.

Dengan memberitahukan yang sebenarnya mengenai status anak angkat telah memberikan kepercayaan, memelihara harga diri dan membantu anak untuk memahami artinya bergabung dalam satu keluarga melalui adopsi tanpa membedakan anak kandung dan anak angkat. Akibat pengangkatan anak dengan mengaburkan identitas asal usul si anak dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya perkawinan yang dilarang oleh agama Islam. Hal tersebut besar kemungkinan terjadi adalah larangan perkawinan karena pertalian nasab/hubungan darah yang terlalu dekat dan pertalian kerabat semenda yaitu hubungan kekerabatan baru yang terbentuk dari adanya suatu perkawinan seperti larangan pria menikahi seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.¹⁹⁰

Jika anak yang diangkat adalah anak perempuan maka yang menjadi wali nikahnya adalah tetap ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali

¹⁸⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, h. 94.

¹⁹⁰ *Ibid*, h.111.

nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhol*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.¹⁹¹

Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan pendidikan anak angkat tersebut. Orang tua angkat berkewajiban memelihara, melindungi, memberikan penghidupan yang layak, dan memberikan pendidikan. Sampai si anak angkat tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang cukup baik.

Hukum Islam telah mengakui dan membenarkan praktek pengangkatan anak, namun hukum Islam sendiri pada dasarnya tidak menentukan syarat apa dan cara bagaimana agar pengangkatn anak itu dianggap sah menurut hukum. Dikarenakan hukum Islam memandang pengangkatan anak harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandung dan sebagai orang lain dalam keluarga orang tua angkat yang tidak dapat saling mewarisi atau sama lainnya.¹⁹²

Orang tua angkat tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta anak angkatnya dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹³

Pengangkatan anak harus berdasarkan putusan pengadilan agar adanya keabsahan anak angkat/ orang tua angkat harus/ hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan sebagai syarat formal pengangkatan anak, tanpa adanya putusan pengadilan keabsahan seseorang sebagai anak angkat/ orang tua angkat harus dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena, dalam hal ini termasuk pembuktian yang dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan putusan pengadilan pada saat penyelesaian gugatan warisan bahwa keabsahan anak angkat/orang tua angkat

¹⁹¹Sumber dari penetapan perkara tahun 2010 di Pengadilan Agama Medan.

¹⁹²Dede Ibin (Hakim pada Pa Gunungsitoli), “ *Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat Dalam Penyelesaian Gugatan Warisan (Wasiat Wajibah) Di Pengadilan Agama*”, dalam Mimbar Hukum, (Mei-Juni), No, 42, h. 26, 29.

¹⁹³Sumber dari Penetapan perkara tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan.

hanya semata-mata dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan, tetapi bisa juga berdasarkan alat bukti saksi, pengakuan (pihak lawan) dan atau alat bukti lainnya.¹⁹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagai suatu sumber hukum positif yang di dalamnya diatur dengan proses yudisial pengangkatan anak maka penyelenggaraan proses yudisial berupa permohonan pengangkatan anak di pengadilan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan proses yudisial di muka pengadilan pada pokoknya bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983. Dimana kedua materi ini berbeda, hal demikian tentunya peraturan pemerintah sebagai suatu sumber hukum positif dalam tata urutan peraturan di Indonesia. Apabila ada materi yang berbeda yang dipergunakan adalah materi pengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007.¹⁹⁵

SEMA tetap dapat diterapkan beriringan dengan saling melengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dalam proses permohonan pengangkatan anak sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹⁶

B. Hasil Penelitian Terhadap Perkara Pengangkatan Anak Tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai momongan, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

¹⁹⁴Dede Ibin, *Pembuktian*, h. 29.

¹⁹⁵*Ibid*, h.124.

¹⁹⁶*Ibid*, h.125.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di kota Medan, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah ada kesepakatan antara kedua pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Medan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Pasal 2, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.¹⁹⁷ Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

Dari hasil wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Agama Medan, yaitu Hakim Drs. H. Abdul Halim, MH. disampaikan bahwa sebelum adanya Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan berpedoman kepada Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun tata cara pengangkatan anak diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007.¹⁹⁸

Antara Undang-undang No 23 tahun 2002 dengan Peraturan Pemerintah RI No 54 tidak terjadi pertentangan, malah saling mendukung. Hal ini dapat kita lihat pasal demi pasal. Pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan anak angkat. Mulai dari jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, Bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan adanya tata cara yang baku, penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak dapat dihindari.

¹⁹⁷Sumber dari perkara 2008-2010 di Pengadilan Agama Medan.

¹⁹⁸Drs. H.Abdul Halim MH, Jabatan Hakim/golongan III C, wawancara di Pengadilan Agama Medan, tanggal 6 Februari 2012.

Menurut Hakim Drs. H. Abdul Halim, MH., pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan nasab. Dalam hal ini, jika yang diangkat adalah anak yang diasuh di panti asuhan dan tidak diketahui orang tua kandungnya, nasab si anak terputus. Sama halnya dengan anak yang dilahirkan di luar nikah, nasab si anak terputus. Jika anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama, dinikahkan di catatan sipil tidak dapat memakai bin/binti yang menunjukkan nasabnya. Mengenai status hukum si anak angkat, setelah ada penetapan pengangkatan anak baru bisa dibuatkan akte kelahiran.¹⁹⁹

Arti penting dari Penetapan Pengadilan adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandungnya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 (lima) permohonan pengesahan pengangkatan anak di kota Medan yaitu di Pengadilan Agama Kota Medan sejak tahun 2008 sampai 2010 untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.²⁰⁰

C. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang “Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan kemajemukan hukum dalam sistem hukum Nasional.” Kompilasi Hukum Islam dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Kewarisan menyatakan “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk

¹⁹⁹ *Ibid*,

²⁰⁰ Sumber Perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama dari tahun 2008 sampai 2010

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.²⁰¹

Pada tahun 1952 adanya pertentangan mengenai hasil Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-undang mengenai Peradilan Anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dimana proses pembuatan hukum Undang-undang perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 tentang “pengangkatan anak yang mengakibatkan putusanya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga sedarah dan semenda garis ke atas dan kesamping.” Ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Pengertian Agama Islam adalah agama yang berunsurkan “aqidah wa syariah”. Islam adalah agama yang merupakan hukum (dalam arti “law”) bagi kaum muslimin, dengan adanya Pengadilan Agama merupakan fardhu kifayah”bagi masyarakat muslim. Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu yang diberlakukan khususnya golongan masyarakat muslim.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk mewujudkan tata kehidupan dalam menegakkan keadilan yang sesuai dengan kebenaran melalui Pengadilan Agama, yang tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dari penjelasan tersebut hanya mengatur Kehakiman.²⁰²

Undang-undang perkawinan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita sesuai dengan pasal 49 ayat 2 point 20 tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.²⁰³

²⁰¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Medan, Duta Karya, 1996), hlm. 111

²⁰² Sulaikin et.al, *Hukum*, h. 51.

²⁰³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 68.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 mengenai penjelasan Pengadilan Agama sesuai dengan Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 ayat 2 tentang penetapan asal usul seorang anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁰⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 membuat kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan anak angkat tidak dalam pasal-pasal melainkan hanya dalam penjelasan Undang-undang sebagai penjabaran dari wewenang Pengadilan bidang Perkawinan.²⁰⁵

Pengaturan kewenangan Pengadilan Agama terhadap pengangkatan anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 merupakan peraturan yang merubah peraturan kewenangan mengadili telah ada. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka kewenangan untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam berubah menjadi kewenangan Peradilan Agama.²⁰⁶

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 di Peradilan Agama yang baru, maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam.

Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili permohonan pengangkatan anak lebih dikhususkan lagi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 dan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006. Sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum).²⁰⁷

Maka dibentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disini adanya perubahan bunyi pasal 2

²⁰⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989, h.68

²⁰⁵ Sulaikin et.al, *Hukum*, h.57.

²⁰⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan SEMA dan PERMA Republik Indonesia tahun 1951-2007*, h. 760.

²⁰⁷ Pagar, *Himpunan*, h. 387.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-undang (pasal 3 A).²⁰⁸

Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara pengangkatan anak di kalangan umat Islam. Diluar pengangkatan anak yang bukan beragama Islam kewenangan Pengadilan Negeri, termasuk pengangkatan anak antar negara yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam.²⁰⁹

Pengadilan Agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam (penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006) angka 37 pasal 49 huruf a Nomor 20 “Penetapan asal usul anak seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” Menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam.²¹⁰

Sebelum lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, telah lahir terlebih dahulu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pasal 39 ayat 2 diatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung, ayat 3 diatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak maka pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA No. 2 tahun 1979 pada tanggal 7 April tahun 1979 tentang

²⁰⁸ *Ibid*, h. 386.

²⁰⁹ <http://muvid.wordpress.com/2008/01/09/adopsi-anak-pasca-perubahan-UU-pa-dualisme-pengadilan.negeri-dengan-pengadilan-agama-benarkah>, (Oktober, 2012).

²¹⁰ Pagar, *Himpunan*, h.387.

pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia disebut dengan “*intercountry*”, putusan pengangkatan harus disampaikan kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Karena tanpa penetapan dan putusan Pengadilan akan menjadi pintu masuk untuk penyeludupan kewarganegaraan dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia.²¹¹

Kemudian SEMA No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak sudah tidak sesuai, yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang merupakan hak asasi manusia bahkan merendahkan martabat bangsa.

Peraturan hukum SEMA No. 2 tahun 1979, Undang-undang No. 4 tahun 1979, SEMA Nomor 6 tahun 1983. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/Kep/VII/1984, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, SEMA No. 3 tahun 2005, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan SEMA Nomor 2 tahun 2009. Dari peraturan tersebut harus dipilih mana yang masih sesuai dan masih berlaku. Sebab SEMA yang dikeluarkan sebelum lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 juga tidak mengatur tentang akibat hukum pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam. Sehingga banyak di kalangan orang-orang Islam melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan sesuai dengan hukum Islam.²¹²

Peraturan tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak baru diundangkan pada 3 Oktober 2007 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991 dalam pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti lain. Jika akte kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah Pengadilan Agama.²¹³

Organisasi yayasan sosial harus mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial dan yayasan yang bersangkutan telah mendapat ijin bergerak di bidang

²¹¹ SEMA Nomor 2 tahun 1979.

²¹² *Ibid*,

²¹³ Pengadilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Medan :Duta Karya,cet ke 2, 1996), h. 91.

pengasuhan anak. Calon anak angkat juga harus mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat. Setelah mendapatkan ijin baru dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang diangkat.²¹⁴

Proses perizinan pengangkatan anak diatur dalam pasal 25, dimana Penjelasan pasal 25 ayat 1 yang dimaksud dengan “Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak” yaitu tim yang dibentuk oleh Menteri, yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memperoleh izin pengangkatan anak dan beranggotakan perwakilan dari Instansi yang terkait.²¹⁵

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasutri yang belum mempunyai keturunan bertujuan untuk keutuhan rumah tangga karena dengan adanya anak akan menambah kebahagiaan. Ada juga pasutri yang sudah mempunyai anak namun tidak dapat menambah keturunan lagi karena sakit.

Langkah ini cukup baik namun harus tetap diperhatikan menjaga hukum agama yang tidak boleh diabaikan karena tujuan utama dibolehkannya mengangkat anak dengan mempunyai tujuan untuk memenuhi keperluan si anak dan ibu/bapak angkat. Yang keduanya mempunyai ikatan seperti keluarga dalam arti anak angkat.

Dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan yang lebih memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Terkadang kondisi ekonomi yang kurang mendukung sangat berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga. Kenyataan lain yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah masih banyak anak-anak dengan kondisi yang kurang baik seperti anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak-anak penyandang cacat.

²¹⁴ <http://makmursunusi.kemensos.org>

²¹⁵ Pagar, *Himpunan*, h. 425.

Pada pasal 25 Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu adanya penanganan yang secara khusus dengan pembinaan, perlindungan baik dari masyarakat maupun dari Pemerintah. Memberikan kesempatan bagi orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan si anak yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku/berdasarkan adat kebiasaan.

Pengangkatan anak sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan, sungguh pun dengan demikian pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat, dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Pengangkatan anak sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan, sungguh pun dengan demikian pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat, dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Pengetahuan masyarakat awam tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam sangatlah minim sekali. Oleh karena itu masyarakat muslim melakukan pengangkatan anak masih dilakukan melalui peraturan perundang-undangan secara resmi melalui Pengadilan Negeri berdasarkan tradisi hukum Barat atau Belanda. Terkadang pengangkatan anak ini masih dilakukan oleh masyarakat diluar Pengadilan yang mempunyai alasan memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh, anak orang lain, biasanya dilakukan orang tua yang tidak mampu.

Bapak/ibu angkat harus benar-benar mengerti dan bertanggung jawab dalam memelihara anak angkat terutama perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, supaya niat yang suci tersebut tidak mendatangkan fitnah. Bapak/ibu harus mengetahui bahwa anak yang diangkat tidak di bin/bintikan kepada bapak angkat, dan keluarga yang mengangkat harus juga mengerti tentang agama karena anak angkat dan keluarga angkat bukan mahram.

Dalam rangka reformasi hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan Undang-undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama Medan.

Berbagai persoalan timbul antara lain pengangkatan anak yang dibolehkan dalam hukum Islam. Agar pelaksanaannya memperoleh hasil yang maksimal diperlukan adanya sosialisasi hal ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Dimana masing-masing golongan penduduk mempunyai prosedur sendiri dan akibat hukum mengenai pengangkatan anak. Dengan adanya keanekaragaman yang sering terjadi menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Pada awalnya pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk mempertahankan garis keturunan/marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Namun dalam perkembangannya memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak yang timbul akibat adanya pengangkatan anak. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak angkat dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur perlindungan anak, hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.²¹⁶

Syarat-syarat pengangkatan anak mempunyai dampak perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu
2. Anak cacat, mental, fisik. Sosial
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarga
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua
5. Hal-hal yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya²¹⁷

Kejahatan semakin meningkat seperti pembuangan bayi, anak-anak ditemui dalam keadaan tidak bernyawa maka perlu adanya penanganan secara khusus untuk menyelamatkan bayi dan anak-anak yang tidak berdosa dengan melakukan

²¹⁶Pagar, *Himpunan Undang-undang No.23 Tahun 2002*, h. 269.

²¹⁷*Ibid.*

perlindungan bayi dan anak-anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak angkat juga mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.

Pengangkatan anak yang menyamakan statusnya dengan anak kandung masih ada di masyarakat oleh sebab itu masyarakat muslim harus memperhatikan ketentuan agama yang mengatur tentang pengangkatan anak. Status anak dijelaskan dalam QS.*al-Isrā* ayat 70.²¹⁸ Bahwa Alquran atau akidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus semua diperoleh melalui kehendak sang Pencipta Allah swt..

Pengangkatan anak yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga anak angkat dapat terlindungi sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak yang dijadikan pedoman di Pengadilan Agama Medan mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.²¹⁹

Dilihat dari hasil penetapan Implementasi pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan berpedoman pada SEMA dan Keputusan Menteri Sosial yang berdasarkan hukum Islam, Alquran dan sunnah sesuai dengan pemikiran Islam, putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan.²²⁰

²¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang, Asy Syifa, 2000), h. 619.

²¹⁹ "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

²¹⁹ Pagar, *Himpunan*, h. 421.

²²⁰ Sumber perkara pengangkatan anak tahun 2008 s/d 2010 di Pengadilan Agama Medan.

Kementrian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak berkerjasama dengan *UNICEF* mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengasuhan jangsan sampai terjadi benturan-benturan peraturan yang akan dibuat ternyata telah diatur oleh peraturan lain. Kementrian Sosial cq Direktorat Pelayanan Sosial Anak mengajukan surat ke Sekretariat Negara untuk merumuskan Rancangan Peraturan tentang Pengasuhan, perwalian anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dapat mencengah proses dalam *ilegal adoption*.²²¹

Dinas Kesejahteraan sosial mempunyai hubungan dengan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mereka yang terlantar karena kurangnya kesejahteraan dan tidak terpenuhi secara baik semua kebutuhan hidupnya. Keluarga yang belum mempunyai keturunan ataupun ingin menambah anak dan anak asuh dapat melakukan pengangkatan anak, sehingga dapat mengurangi anak-anak balita yang ditelantarkan.

Sebelum melakukan pengangkatan anak terlebih dahulu pasangan suami/istri mengetahui proses permohonan pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat permohonan

Syarat formil permohonan yang diajukan secara tertulis atau lisan, diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh pemohon atau oleh kuasanya dengan dibubuhi materai yang cukup, permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak.

b. Syarat materiil permohonan

1. Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permononan penetapan pengesahan pengangkatan anak
2. Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan.

²²¹ <http://makmursunusi>.

3. Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah”. Tidak boleh ditambah dengan petitum lain. Misalnya menambah petitum dengan meminta agar anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat (pemohon).²²²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengangkatan adalah sebagai berikut:

1. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²²³

Pengangkatan tidak ditentukan batasan jumlah seseorang untuk mengangkat anak, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak maka pasangan tersebut boleh mengangkat anak dua atau lebih. Terkadang mengangkat anak masih bayi dan ada pula yang masih dalam kandungan, dan usia remaja hal ini sesuai dengan keinginan pasangan suami/istri.

Pasutri ingin melakukan pengangkatan anak harus mengetahui prosedur yang telah ditentukan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam pasal 13 berbunyi persyaratan dalam mampu ekonomi dan sosial, membuat

²²² Mahkamah Agung, *SEMA dan PERMA*, h. 760 .

²²³ Pagar, *Himpunan* , h. 269.

pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak, kesejahteraan serta perlindungan anak.

Sebelum melakukan pengangkatan anak pasangan suami/istri tersebut harus mengetahui langkah-langkah yang harus dipersiapkan mengenai kelengkapan surat-surat seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran si anak atau jika belum ada dapat menggunakan surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau bidan tempat si anak dilahirkan juga penting untuk disertakan adalah surat dari Departemen Sosial yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 (UU RI No.3 2006) berbunyi pembuatan akte kelahiran didasarkan pada surat keterangan dan orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.²²⁴

Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan penyerahan anak antara orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas kesejahteraan Sosial, sedangkan anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka di rumah sakit atau klinik bersalin, maka pihak yang berwenang menyerahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, atau anak tersebut dibuang oleh orang tua kandungnya.

Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin Menteri dan atau Kepala Instansi Sosial. Yang disesuaikan dengan pasal 10.²²⁵ Penjelasan mengenai pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan “pengangkatan anak secara langsung” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak” adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

²²⁴Hadi Setiadi Tunggal, *Undang-undang*, h. 46.

²²⁵Pagar, *Himpunan*, h.422 .

Pasal 10 berbunyi: 1.Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.2.Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.

Di dalam akte dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan di dalam tambahan itu disebutkan pula nama ayah sebagai orang tua angkat, hal ini diatur lebih jelas adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat pemohon
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib melaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran.

Setelah surat-surat tersebut sudah lengkap maka dapat diajukan bersama dengan Surat Permohonan Pengangkatan Anak yang ditujukan ke Pengadilan Agama untuk kemudian hari mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat. Penetapan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang mana bin/binti si anak masih tetap dipakai.²²⁶

Jika persyaratan sudah selesai, langkah selanjutnya membawa penetapan tersebut bersama Akte Kelahiran yang telah ada ke Kantor Catatan Sipil untuk diberi keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akte kelahiran tersebut telah diangkat oleh pasangan suami isteri berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dengan nomor sekian. Pemerintah dalam melakukan pencatatan anak angkat telah ditetapkan ke Pengadilan Agama yakni “Membuat catatan pinggir pada akte kelahiran anak bahwa anak yang bersangkutan sekarang telah menjadi anak angkat A dan B dan hak kewajiban pemeliharaan anak telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.”²²⁷ Orang tua angkat dapat mengajukan permohonan tunjangan gaji untuk anak angkatnya yang disesuaikan dengan asas *personalitas* Islam disesuaikan dengan Pengadilan Agama Medan.

Jika perkawinan beda Warga Negara telah bercerai dan mempunyai anak dari hasil perkawinan yang sah maka nasab si anak masih memakai nama dari

²²⁶ Alam dan Fauzan, *Hukum*, h. 54.

²²⁷ *Ibid*,

ayahnya. Namun jika kehidupan si istri kurang memadai, ia ingin anaknya di angkat oleh pasangan suami/istri warga Negara Indonesia yang mampu maka harus sesuai dengan pasal 15 (PP RI No. 54 tahun 2007) berbunyi “Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf (b), harus memenuhi syarat:

- a) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan
- b) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.”

Anak angkat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002.²²⁸

Yang harus diperhatikan dan disadari oleh calon ayah/ibu angkat dan ayah/ibu kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

²²⁸1.Hak anak atas hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan berpartisipasi secara wajar (lihat pasal 4 Undang-undang Nomor No 23/2002)

Pasal 4 ini merupakan norma hukum yang merupakan inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, karena hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun. Sedangkan hak tersebut meliputi kesehatan, pendidikan dan hak untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 juga menyebutkan tentang hak yang diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial termasuk agama.2.Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (lihat pasal 5 UU No.23/2002). Pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 27 dan pasal 28. Hak identitas ini merupakan hak pertama yang harus diterima oleh anak. Di Indonesia masih sangat minimal melakukan pencatatan kelahiran anak. 3.Hak anak untuk beribadah menurut agamanya serta berpikir dan berekspresi (lihat pasal 6 UU No. 23/2002).4.Hak beribadah menurut agamanya merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan terhadap hak anak untuk berkembang pasal 14 Konvensi Hak Anak. Namun rumusan norma pasal 6 UU No. 23/2002 yang memberikan hak anak untuk beribadah menurut agamanya dapat berpikir maupun berekspresi. Secara substantif pasal 6 UU No 23/2002 ini berbeda dengan pasal 14 Konvensi Hak Anak yang memberikan kebebasan anak untuk beragama. Dalam pasal 6 UU No.23/2002 yang diberikan hak kebebasan adalah untuk beribadah yakni menjalankan ajaran agama tertentu yang sudah dianut seorang anak.

Pasal 14 ayat 2 Konvensi Hak Anak (KHA) memberikan ruang lingkup bagi orang tua untuk menjalankan tugasnya sebagai orang tua guna memberi pengarahan kepada anak. Jadi kebebasan dalam menjalankan hak atas beragama, berfikir dan berekspresi yang dijamin dan dihormati dalam pasal 14 KHA tetap memberikan ruang bagi berjalannya peran pengarahan dan edukasi terhadap anak yang dilakukan oleh dan berdasarkan kewajiban orang tua.5.Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (lihat pasal 7 ayat 1 UU No.23/2002). Namun jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang si anak atau menelantarkan anak maka ia berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat pasal 7 ayat 2 UU No.23/2002).6.Hak memperoleh kesehatan, pendidikan, didengar pendapatnya, memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat (lihat pasal 8,9,10,11 UU No. 23/2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 3 berbunyi “Peraturan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa, calon orang tua angkat harus seagama dengan dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan).”²²⁹

Permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan harus mengikuti daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang diangkat. Domisili anak yang diangkat harus dijelaskan dalam lampiran SEMA No. 6 tahun 1983 angka IV sebagai berikut:

- a. Domisili anak mengikuti domisili orang tua
- b. Anak yang orang tuanya bercerai mengikuti kediaman walinya, karena perceraian dalam Islam tidak menyebabkan hilangnya kekuasaan orang tua atas anak, maka bagi anak yang orang tuanya bercerai mengikuti orang tua
- c. yang memiliki hak asuh anak atau orang tua yang mengasuh anak tersebut.
- d. Anak diluar nikah mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibunya
- e. Anak yang dibesarkan oleh selain orang tuanya mengikuti domisili yang sehari-hari merawat anak tersebut.²³⁰

Untuk melaksanakan pengangkatan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 di Pengadilan Agama Medan sudah mulai terwujud, dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang pengangkatan anak dilihat dalam beberapa pasal. Kedudukan keduanya sangat mendukung dalam pengangkatan anak sehingga anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum sampai ia berusia cakap hukum, perlindungan tersebut ia dapatkan dari orang tua angkat.²³¹

²²⁹ Pagar, *Himpunan*, h. 421.

²³⁰ Mahkamah Agung, *Himpunan SEMA dan PERMA*.

²³¹ Pagar, *Himpunan*, h. 269.

Pengadilan Agama Medan menerapkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 harus diperhatikan karena :

1. Beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan kasih sayang.
2. Tidak sampai memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan orang tua angkat.
3. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, ia tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Begitu pula orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
4. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus adanya kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah
5. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, menuliskan nama anak angkat di KTP, pasport, akte kelahiran, ijazah, kecuali sebagai tanda pengenalan atau alamat.
6. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkat tersebut²³²

Pengadilan Agama Medan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007, seperti perkara pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga masyarakat Islam sudah dapat melakukan pengangkatan anak sesuai syariat Islam. Ketentuan peraturan tersebut anak angkat tidak boleh dipanggil dengan nama ayah angkat, tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkat, karena status anak angkat tidak memutuskan ketetapan nasab dari ayah biologisnya.²³³

Jika sudah ada penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan, barulah dapat dibuat akte kelahiran nama anak angkat tetap tercantum nama orang tua kandungnya sehingga tidak gugur atau hapus dengan sendirinya.

²³² Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1981), h. 59

²³³ <http://www.waspada.co.id>, adopsi anak dalam pandangan Islam, dalam Mimbar Jurnal Kamis 14 mei 2010.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Hakim memutuskan penetapan pengangkatan anak sesuai No. 129/Pdt.P/2008/Pa Medan, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa “Pemohon pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan”.²³⁴

Sehingga status anak angkat masih tetap dinyatakan sebagai anak kandung dari orang tua kandung, hanya sebutan anak angkat dari keluarga yang mengangkat. Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Orang tua angkat harus memberitahukan kepada si anak setelah ia benar-benar siap mendengar asal usul ia dilahirkan, siapa orang tua kandung dan siapa pula saudara-saudaranya.

Sesuai dengan pasal 7 ayat 1 berbunyi UU No.23/2001

” setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, ayat 2 berbunyi Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh, anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”²³⁵

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 di Pengadilan Agama Medan masyarakat beragama Islam dapat terlindungi karena mereka masih dapat meletakkan nama ayah kandung dibelakang nama anaknya. Status si anak pun masih tetap anak kandung dari bapak/ibunya. Namun arti anak telah berbeda anak kandung menjadi anak angkat. Status anak jika ia diangkat maupun diasuh tetap memakai anak orang tua kandungnya. Hal ini tidak dapat diingkari oleh si anak dikemudian hari jika ia tidak mau bertemu dengan orang kandung. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, anak tidak dapat diambil kembali oleh karena anak tersebut telah berkekuatan hukum.²³⁶

²³⁴ Nomor perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan

²³⁵ Pagar, *Himpunan*, h. 290

²³⁶ Pagar, *Himpunan*, h. 290

Dalam pengangkatan anak perlu adanya pengawasan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan. Pengawasan tersebut bisa dilakukan oleh perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek kebidanan, panti sosial pengasuhan anak. Maka pihak Calon orang tua angkat juga harus memenuhi persyaratan seperti sehat jasmani, berumur paling rendah dan yang paling tinggi 55 tahun, beragama yang sama dengan anak angkat, tidak pernah melakukan tindak hukum, status perkawinan 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, belum punya anak maupun sudah punya anak, mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.

Sebelum kedua orang tua kandung dan orang tua angkat melakukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Medan, terlebih dahulu diberikan bimbingan pelaksanaan pengangkatan anak terhadap masyarakat melalui konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Agar tidak terjadinya salah informasi bagaimana cara untuk melakukan pengangkatan anak.

Agar antara orang tua angkat dan orang tua kandung dapat memahami dan mempunyai kesiapan mental dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Orang tua tunggal dapat memohon melakukan pengangkatan anak namun harus adanya izin dari Menteri, pemberian izin ini dapat diajukan ke Kepala Instansi Sosial di provinsi. Mengangkat anak dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu yang paling singkat 2 (dua) tahun. Jika anak yang diangkat anak kembar ia dapat mengangkatnya sekaligus. Sebelum terlaksananya pengangkatan anak harus dilakukan secara tertulis dan akte notaris serta adanya saksi-saksi, agar lebih menjamin dan mengetahui asal usul si anak mengenai siapa ayah kandungnya. Agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sesuai pihak yang bersangkutan, harus mampu menangani penyimpangan yang ada dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika laki-laki yang menghamili wanita, maka hanya ia saja yang dapat menikahnya, agar tidak terjadi pencampuran nasab anak yang lahir apabila wanita itu kawin dengan orang yang bukan menghamilinya. Maka si wanita tersebut perlunya konseling pada pihak Pengadilan Agama, dan diberikan keterangan bahwasanya anak yang dilahirkan

diluar pernikahan, anak tersebut tidak mendapatkan nasab dari keturunan wanita dan laki-laki. Penjelasan mengenai pasal 26 huruf c yang dimaksud dengan konseling adalah kegiatan yang dilakukan setelah tahap konsultasi dalam hal terjadinya permasalahan pengangkatan anak.²³⁷

Hakim di Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan perkara pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah sesuai dengan syariat Islam. Jika si anak tersebut dilahirkan dalam dua kewarganegaraan, maka nama ayah kandung tetap dipakai walaupun kedua orang tuanya telah bercerai karena perkawinan tersebut sah dan mempunyai bukti buku nikah. Tetapi jika orang tua beda agama dinikahkan di catatan sipil maka anak tidak dapat memakai bin/binti.²³⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak ada dua macam. Hal ini disebutkan pada pasal 7 yang berbunyi “Pengangkatan anak terdiri dari:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
2. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.”²³⁹

Pengangkatan anak pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu ekonominya untuk mendidik dan membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah namun belum dikarunai momongan, sehingga memutuskan untuk mengangkat anak.

Sebelum orang tua angkat melakukan pengangkatan anak terhadap orang tua kandung hendaknya perlu adanya pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak lebih menekankan pada terjadinya peristiwa pengangkatan anak, dilihat kapan peristiwa pengangkatan anak tersebut terjadi, apa status anak angkat pada saat itu.

²³⁷*Ibid*,

²³⁸Hasil Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama

²³⁹Pagar, *Himpunan*, h.421.

Apakah ada persetujuan dari orang tua kandung, apa motif orang tua kandung memberikan persetujuan pengangkatan anak pada saat itu, serta motif orang tua angkat melakukan pengangkatan anak pada saat itu, dimana peristiwa pengangkatan anak tersebut terjadi, bagaimana kondisi anak angkat selama ini, dan bagaimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat selama ini.²⁴⁰ Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Kota Medan, pada umumnya diawali dari adanya penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dibuatlah surat penyerahan tersebut yang disaksikan keluarga dan tetangga dekat.

Selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dari pengangkatan anak tersebut, maka orang tua angkat tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Medan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu di sini termasuk perkara pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.²⁴¹

Surat penetapan pengesahan pengangkatan anak dapat dirumuskan sebagai berikut: “menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama.... bin/binti....., alamat.... terhadap anak laki-laki/perempuan bernama.....bin/binti....., umur..... di.... pada....²⁴²

Perlunya Penetapan Pengadilan agar antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan sebagai anak angkat sehingga status dan kedudukan anak angkat menjadi anak angkat yang sah. Disamping itu untuk lebih memperkuat kedudukan dan status si anak dengan orang tua angkatnya serta menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut. Jika tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anak, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung si anak.

²⁴⁰ *Ibid*,

²⁴¹ Suliaki et.al, *Hukum*, h. 50.

²⁴² Mahkamah Agung, *Himpunan SEMA dan PERMA*, h. 282.

BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak sebagai suatu sumber hukum positif yang mana di dalamnya diatur proses yudisial mengenai pengangkatan anak. Proses yudisial di depan pengadilan bersumber pada Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1983. Peraturan yang terlebih dahulu berlaku tidak adanya pertentangan malah saling mendukung.

Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan perkara penetapan pengangkatan anak orang tua angkat tidak menerima warisan namun diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta anak angkatnya dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan namun diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengangkatan anak harus berdasarkan putusan pengadilan agar adanya keabsahan anak angkat/ orang tua angkat harus/ hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan sebagai syarat formal pengangkatan anak, tanpa adanya putusan pengadilan keabsahan seseorang sebagai anak angkat/ orang tua angkat harus dinyatakan tidak terbukti. Berdasarkan putusan pengadilan pada saat penyelesaian gugatan warisan bahwa keabsahan anak angkat/orang tua angkat hanya semata-mata dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan, tetapi bisa juga berdasarkan alat bukti saksi, pengakuan (pihak lawan) dan atau alat bukti lainnya.

B.SARAN

Penelitian penulis ini adalah studi kasus yang membahas penerapan Peraturan Pemerintah pada tujuan, syarat dan cara pengangkatan anak. Diharapkan ada penelitian berikutnya yang berbentuk studi lapangan yang membahas mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di

masyarakat. Pengangkatan anak membutuhkan kepastian hukum agar jelas status dan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat. Menurut Islam pengangkatan anak tidak mempengaruhi hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri. Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan agama tidak menyebabkan nasab dari anak angkat.

Namun bukan berarti tidak ada tujuan lain dibalik pengangkatan anak oleh orang-orang yang berniat untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, seperti perdagangan anak dan perdagangan organ tubuh anak. Dengan banyaknya penyimpangan dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak maka diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan lebih memahami Peraturan Pemerintah RI No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku yang Berbahasa Arab

Al-Qur'an dan terjemahan

Ali As Şabuni, Muhammad dan Mujallad Saniah, Tafsir Al Ahkām min al- Qur'an, Beirut: Beirut: Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 2004

Asqalânî, Ibn Hajar, Fath al-Bârî, Kairo: Dâr Mişr, 2001, jilid XII

Az Zuhailly, Wahbah Tafsir al Munir, Beirut: Dār al1991, jilid 21-22

B.Buku-buku yang Berbahasa Indonesia

Amin Muhammad Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004

Bushar, Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006

Dahlan, A.Azizi, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jilid I

Dahlan Zaini et al, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1992

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Djatikumoro, Lulik, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011

Daud, Mohammad, Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo, 1993

Departemen Agama Republik Indonesia ,Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003

Gazalba, Sidi, Masyarakat Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1989

Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Hasan, Ali, Hukum Warisan Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Hasan, Cik Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo, cet 3, 2003
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: BayuMedia, 2005
- Jauhari, Imam Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Bangsa, 1989
- Kamil, Ahmad, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama, 2008, cet 1
- Meliala, S Djaja Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Pagar, Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Peradilan Agama Di Indonesia PP No.54 tahun 2007, Medan: Perdana Publishing, 2010
- Prinst, Darwin, Hukum Anak Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Quraish, Shihab, M, Tafsir al-Misbāh: pesan, kesan dan keserasian al-Qurān, Jakarta : Lentera hati, 2004, Jilid XV
- S.Meliala, Djaja Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982
- SY, Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, 2008
- Setiadi Tunggal, Hadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta : Harvarindo, 2010

Syamsu, Andi Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Zaini,Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: SinarGrafika, 2002

R.Soepomo, Bab-bab Hukum Adat, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1967.

Soetjojprawirohamidjojo,R Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Airlangga University Press, 2002

Sulaikin Lubis et.al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2005

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009

C.Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Medan: Duta Karya, 1996

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/2006 tentang Pengangkatan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Medan: Duta Karya, 1996.

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No.4 Tahun 1979

Mahkamah Agung, Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-2007, 2007

D.Artikel di dalam Jurnal atau Majalah

Ichtiando, Sistem Kekeluargaan Islam, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 45, 1999

Ibin Dede, Pembuktian Keabsahan Anak Angkat/Orang Tua Angkat Dalam Penyelesaian Gugatan Warisan (Wasiat Wajibah) Di Pengadilan Agama, Mimbar Hukum Islam, No. 42, Mei-Juni, 1999

Pagar, Kedudukan Anak Angkat Dalam Warisan (Suatu Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia), Mimbar Hukum, No.54 Thn XII, Jakarta, 2001

Satjipto Rahardjo, *Peradilan Keluarga*, Jakarta : al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Mimbar Hukum No. 10, 1993

E.Tesis

Ariani, Farida, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam di Indonesia menganalisa kasus Penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 9/Pdt.P/2008/PA Simalungun dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Jakarta : FHUI, 2009.

Hariadi,Tresna, Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (Studi pada Pengadilan Agama Medan), Medan : Magister Kenotariatan, USU, 2004

Khairuman, Putusan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Suatu Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan), Medan, USU, 2004

Rihad,Armidin,menulis artikel berjudul “Perlukah Memberitahu Status Anak Adopsi?”yang dimuat di media kompasiana Tanggal 12 Juli 2011.

Yasir,Nasution,M, Kewenangan Peradilan Agama Menyelesaikan Permohonan Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Sumatera Utara, Medan, IAIN, 2011

F.Internet

[http:// Anak Asuh dan Anak Angkat dan keluarga Muslim blogs.htm](http://AnakAsuhdanAnakAngkatdanKeluargaMuslimblogs.htm). (Oktober, 2011)

<http://muvid.wordpress.com/2008/01/09/adopsi-anak-pasca-perubahan-UU-pa-dualisme-pengadilan.negeri-dengan-pengadilan-agama-benarkah>, (April, 2012)

<http://www.waspada.co.id>, adopsi anak dalam pandangan Islam, Kamis 14 Mei 2010, Mimbar Jurnal

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riri Silvia
N i m : NIM 10 HUKI 1955
Tempat/tgl lahir : Medan, 5 April 1977
Pekerjaan : Manager PT. Darul Iman Tour & Travel
Alamat : Jl Bono No 44 Glugur Darat Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN ANAK ANGKAT DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (STUDI PERKARA 2008 s/d 2010)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 6 Mei 2013

Yang membuat pernyataan

Riri Silvia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.IDENTITAS PRIBADI

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Riri Silvia |
| 2. Nim | : 10 HUKI 1955 |
| 3. Tpt/tgl Lahir | : Medan/05 April 1977 |
| 4. Pekerjaan | : Manager PT.Darul Iman Tour & Travel |
| 5. Alamat | : Jl.Bono No.44 Glugur Darat Medan |

II.RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|---|----------------------|
| 1.Tamatan SD PERTIWI | Berijazah tahun 1989 |
| 2.Tamatan SMP MEDAN PUTRI | Berijazah tahun 1992 |
| 3.Tamatan SMA UISU | Berijazah tahun 1995 |
| 4.Tamatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Berijazah tahun 1999 |

